



**ANALISIS PENGARUH VARIABEL EKONOMI
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI 6 KORIDOR EKONOMI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Fitria Iswaningrum

NIM. 140810101150

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS PENGARUH VARIABEL EKONOMI
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI 6 KORIDOR EKONOMI INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Fitria Iswaningrum

NIM. 140810101150

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati serta ungkapan atas rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Syamsul Mualim dan Ibunda Sulistiani tercinta, yang telah memberikan doa serta dorongan dan dukungan kepada ananda saat ini, yang mendidik ananda dengan rasa cinta dan kasih sayang dan dengan ketulusan hati, dan selalu menjadi inspirasi untuk mendorong ananda untuk meraih cita-cita.
2. Segenap keluarga besar yang telah mendorong ananda dan memberikan semangat dalam setiap perjalanan hidup kepada ananda untuk menempuh pendidikan agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
3. Guru-guruku yang telah memberikan ilmu yang sangat tidak ternilai kepada ananda mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sampai saat ini ananda bisa menempuh ke perguruan tinggi.
4. Teman-temanku yang telah memberikan dorongan semangat, memberikan bantuan kepada ananda serta selalu menemani ananda dalam menuntut ilmu.
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap ^{*)}

Kadang kita harus mundur sedikit, hanya untuk melompat lebih jauh ^{**)}

*) Terjemahan Al – Qur’an Surat Al – Insyirah ayat 6 – 8

***) Anonim

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitria Iswaningrum

NIM : 140810101150

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia“ adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada intuisi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Oktober 2018

Yang menyatakan,

Fitria Iswaningrum
140810101150

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH VARIABEL EKONOMI
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI 6 KORIDOR EKONOMI INDONESIA**

Oleh:

Fitria Iswaningrum

NIM. 140810101150

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. P. Edi Suswandi, M.P.

Dosen Pembimbing II : Drs. Duwi Yunitasari, S.E., M.E.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi
Indonesia
Nama Mahasiswa : Fitria Iswaningrum
NIM : 140810101150
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 1 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. P. Edi Suswandi, MP
NIP. 195504251985031001

Drs. Duwi Yunitasari, SE. ME
NIP. 197806162003122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS PENGARUH VARIABEL EKONOMI
TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI 6 KORIDOR EKONOMI INDONESIA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fitria Iswaningrum

NIM : 140810101150

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

16 November 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. I Wayan Subagiarta, M. Si. (.....)
NIP. 196004121987021001
2. Sekretaris : Dr. Rafael Purtomo Somaji, M. Si. (.....)
NIP. 195810241988031001
3. Anggota : Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E., M.Si. (.....)
NIP. 197002061994031002

Foto 4x6
Warna

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP. 197107271995121001

Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Di 6 Koridor Ekonomi Indonesia

Fitria Iswaningrum

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia yang pembagian koridornya didasarkan pada dokumen MP3EI yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali – Nusa Tenggara dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku yang dipengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi (Jumlah Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto, dan Investasi). Data yang di gunakan merupakan data *time series* dan *cross section* berdasarkan provinsi-provinsi di Indonesia selama tahun 2007-2016. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu Analisis Regresi Data Panel. Penelitian ini menunjukkan bahwa: Variabel Angkatan Kerja, Produk Domestik Regional Bruto, dan Investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, tapi di Koridor Jawa, Koridor Sulawesi, dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku variabel produk domestik regional bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan di Koridor Jawa, Koridor Sulawesi, Koridor Bali – Nusa Tenggara, dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan di Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Bali-Nusa Tenggara, dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku, namun di Koridor Sulawesi upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja;

Kata Kunci : MP3EI, Koridor Ekonomi Indonesia, Regresi Data Panel, Jumlah Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja

*Analysis the Effect of Economic Variables on Labor Absorption
in 6 Indonesian Economic Corridors*

Fitria Iswaningrum

*Department of Economics and Development Study, the Faculty of Economics and
Bussines, the University of Jember*

ABSTRACT

This research aims to understand the Labor Absorption in 6 Indonesian Economic Corridors whose distribution of corridors is based on the MP3EI document, namely Sumatera Corridor, Java Corridor, Kalimantan Corridor, Sulawesi Corridor, Bali – Nusa Tenggara Corridor, and Papua – Kepulauan Maluku Corridor which is influence by several economic variables (Labor Force, Provincial Minimum Wage, Gross Regional Domestic Product, and Investment). The data used is time series and cross section based on provinces in Indonesia during 2007-2016. The method used in this research is the Panel Data Regression Analysis. This research shows that: Variables of The labor force, Gross Regional Domestic Product and Investment have a positive effect for labor absorption, but in the Java Corridor, Sulawesi Corridor and Papua – Kepulauan Maluku Corridor the gross regional domestic product has no significant, and in the Java Corridor, Sulawesi Corridor, Bali – Nusa Tenggara Corridor, and Papua – Kepulauan Maluku Corridor, the investment have no significant effect on labor absorption. While Variable of Provincial minimum wages have no significant effect on the Sumatera Corridor, Java Corridor, Kalimantan Corridor, Bali – Nusa Tenggara Corridor, and Papua – Kepulauan Maluku Corridor, but in Sulawesi Corridor the provincial minimum wages has a positive and significant effect on labor absorption;

Keywords : MP3EI, Indonesian Economic Corridors, Panel Data Regression, Labor Force, Provincial Minimum Wages, Gross Regional Domestic Product, Investment, Labor Absorption.

RINGKASAN

Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia, Fitria Iswaningrum, 140810101150, 2018, 99 halaman, Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan dalam perekonomian. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang tidak terlepas dari suatu masalah-masalah dalam perekonomian, terutama mengenai masalah ketenagakerjaan. Selama enam tahun terakhir jumlah angkatan kerja di Indonesia mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini menunjukkan jumlah penawaran tenaga kerja di dalam pasar bertambah, namun bertambahnya penawaran tenaga kerja ini tidak diimbangi dengan permintaan tenaga kerja sehingga menyebabkan tingginya pengangguran. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia terserap di Pulau Jawa yaitu sebesar 66,8 juta jiwa atau sekitar 56,4% dari seluruh penduduk bekerja di Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak meratanya pembangunan ekonomi, sehingga untuk mendorong pembangunan dibentuklah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang disusun oleh Presiden RI ke – 6.

Salah satu strategi utama MP3EI ini adalah mengembangkan potensi ekonomi wilayah menjadi 6 koridor sesuai dengan potensi-potensi yang terdapat dalam wilayah tersebut. 6 koridor tersebut adalah Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku. Dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi antara lain jumlah angkatan kerja, upah minimum provinsi, produk domestik regional bruto, dan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia yang pembagian koridornya didasarkan pada dokumen MP3EI yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali – Nusa Tenggara dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku tahun 2007-2016 yang dipengaruhi oleh 4 variabel ekonomi tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi Data Panel menunjukkan: di 6 Koridor Ekonomi Indonesia yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali – Nusa Tenggara dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku menunjukkan bahwa variabel Angkatan Kerja berpengaruh signifikan secara positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Di Koridor Ekonomi Sumatera, koefisien Angkatan Kerja sebesar 0.981735 dengan signifikansinya 0.0000. Koridor Ekonomi Jawa, koefisien Angkatan Kerja sebesar 0.947238 dengan signifikansinya 0.0000. Koridor Ekonomi Kalimantan, koefisien Angkatan Kerja sebesar 0.876296

dengan signifikansinya 0.0000. Koridor Ekonomi Sulawesi, koefisien Angkatan Kerja sebesar 0.493548 dengan signifikansinya 0.0000. Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara, koefisien Angkatan Kerja sebesar 0.949665 dengan signifikansinya 0.0000. Dan di Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku, koefisien Angkatan Kerja sebesar 0.978265 dengan signifikansinya 0.0000. Menurut teori Adam Smith, meningkatnya jumlah penduduk terutama angkatan kerja berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya angkatan kerja akan meningkatkan perekonomian karena angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam perekonomian dan digunakan sebagai salah satu faktor produksi dalam perusahaan.

Untuk variabel UMP, hasil penelitian menunjukkan di Koridor Sumatera, Koridor Bali – Nusa Tenggara dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku menunjukkan variabel UMP berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Di Koridor Ekonomi Sumatera memiliki koefisien sebesar -0.017523 dengan probabilitas 0.1182, Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara memiliki koefisien sebesar -0.024715 dengan probabilitas 0.1944, dan di Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku memiliki koefisien yang sebesar -0.001705 dengan probabilitas 0.7108. Ini sesuai teori ketika upah naik maka akan mengurangi penyerapan tenaga kerja, tidak signifikannya upah ini dikarenakan ketika tingkat upah naik maka para pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup dan akan memiliki produktifitas yang lebih tinggi, sehingga dapat menaikkan output. Tingginya produktifitas para karyawan dapat menekan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga tidak terjadi pengurangan penyerapan tenaga kerja.

Namun di Koridor Jawa dan Koridor Kalimantan dan di Koridor Sulawesi, variabel UMP berpengaruh secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Di Koridor Ekonomi Jawa, upah memiliki koefisien sebesar 0.047223 dengan probabilitas 0.5810, Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki koefisien sebesar 0.006062 dengan probabilitas 0.2809, dan di Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki koefisien yang sebesar 0.111832 dengan probabilitas 0.0000. Berpengaruhnya upah secara positif dikarenakan meningkatnya upah mempengaruhi daya beli masyarakat karena pendapatan mereka lebih besar dan besarnya daya beli ini memberikan keuntungan besar kepada perusahaan. Sehingga dengan keuntungan tersebut perusahaan dapat menambah perusahaan baru yang memerlukan tambahan pekerja.

Kemudian variabel PDRB di Koridor Sumatera, Koridor Kalimantan, dan Koridor Bali – Nusa Tenggara variabel PDRB berpengaruh signifikan secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Di Koridor Ekonomi Sumatera, koefisien PDRB sebesar 0.591339 dengan signifikansinya 0.0002. Di Koridor Ekonomi Kalimantan, koefisien PDRB sebesar 0.145380 dengan signifikansinya 0.0239. Dan di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara, koefisien PDRB sebesar 1.248834 dengan signifikansinya 0.0244. Hal ini menunjukkan meningkatnya PDRB akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja guna mengejar peningkatan penjualan, sehingga menyebabkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Sedangkan di Koridor Jawa, Koridor Sulawesi, dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku menunjukkan bahwa variabel PDRB tidak

berpengaruh signifikan secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Di Koridor Ekonomi Jawa, koefisien PDRB sebesar 0.298947 dengan signifikansinya 0.1534. Koridor Ekonomi Sulawesi, koefisien PDRB sebesar 0.383419 dengan signifikansinya 0.4649. Dan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku, koefisien PDRB sebesar 0.121720 dengan signifikansinya 0.5801. Tidak signifikannya PDRB ini dikarenakan ketika hasil produksi meningkat, para pengusaha menambah faktor produksi dengan menggunakan mesin dengan tujuan untuk lebih memaksimalkan hasil output perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Koridor Sumatera dan Koridor Kalimantan variabel investasi berpengaruh signifikan secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Di Koridor Ekonomi Sumatera, koefisien investasi sebesar 1.916452 dengan signifikansinya 0.0125. Sedangkan di Koridor Ekonomi Kalimantan, koefisien investasi 1.283097 dengan signifikansinya 0.0002. Jadi ketika investasi meningkat maka tenaga kerja yang diminta akan semakin besar. Sedangkan di Koridor Jawa, Koridor Sulawesi, Koridor Bali – Nusa Tenggara, dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku menunjukkan variabel investasi tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Di Koridor Ekonomi Jawa, koefisien investasi sebesar 1.833418 dengan signifikansinya 0.0545, Koridor Ekonomi Sulawesi koefisien investasi sebesar 1.548204 dengan signifikansinya 0.5340. Dan di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara, koefisien investasi sebesar 1.248723 dengan signifikansinya 0.1363, di Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku koefisien investasi sebesar 0.103788 dengan signifikansinya sebesar 0.6488. Hal ini dikarenakan Pertama, karena investasi oleh para pengusaha yang terjadi lebih kepada investasi yang padat modal daripada padat karya. Kedua, dikarenakan faktor struktural, kelembagaan politik sehingga menyebabkan harga tenaga kerja lebih tinggi. Ketiga, investasi dari pemerintah hanya berorientasi kepada pembangunan yang kurang menyerap tenaga kerja, Keempat, investasi yang ada hanya dalam bentuk tanah dan tidak memiliki nilai ekonomi.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah, berkah serta ridho-Nya dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW atas petunjuk yang telah diberikan kepada umatnya mulai zaman jahiliyah hingga menuju jalan kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di 6 Koridor Ekonomi Indonesia”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik motivasi, nasehat, dorongan, kasih sayang, dan kritik yang positif dan membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. P. Edi Suswandi, M.P., selaku Dosen Pembimbing utama yang telah memberikan banyak waktu luang, tenaga serta pikiran untuk membimbing, memberikan arahan dalam membantu menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Drs. Duwi Yunitasari, S.E., M.E., selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan dalam penyusunan skripsi. Serta dengan ikhlas membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang S1;
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes. selaku Ketua dan Dr.Lilis Yuliati, S.E, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;

5. Ibu Dr. Regina Niken W., S.E, M.Si. selaku Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
7. Ayahanda Syamsul Mualim dan Ibunda Sulistiani terima kasih yang tulus penulis ucapkan atas doa yang terus dipanjatkan untuk ananda, dukungan, semangat, kasih sayang yang tulus, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan pengorbanan yang sampai saat ini diberikan tidak dapat dinilai oleh apapun;
8. Seluruh keluarga besar dan teman-teman di kampung halaman yang telah memberikan doa, dukungannya serta selalu menjadi motivasi dan pengingat bagi penulis;
9. Sahabat sekaligus keluarga Erfatul, Azzura, Azizah, Cindy, Iswanto, Melinda, dan Alwan terima kasih banyak atas waktu luang yang selalu kalian berikan, dukungan, dan semangat yang memotivasi penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 25 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI | vi |
| HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN | viii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| RINGKASAN | xi |
| PRAKATA | xiv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xxi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxii |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan | 9 |
| 1.4 Manfaat | 9 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Landasan Teori | 10 |
| 2.1.1 Tenaga Kerja..... | 10 |
| 2.1.2 Permintaan Tenaga Kerja | 12 |
| 2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja..... | 14 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1.4 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)..... | 15 |
| 2.1.5 Angkatan Kerja..... | 18 |
| 2.1.6 Upah..... | 21 |
| 2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto..... | 26 |
| 2.1.8 Investasi | 29 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 33 |
| 2.3 Kerangka Konseptual..... | 39 |
| 2.4 Hipotesis Penelitian | 41 |
| BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN..... | 42 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 42 |
| 3.2 Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 43 |
| 3.4 Metode Analisis Data..... | 43 |
| 3.4.1 Pemilihan Metode Estimasi Data Panel..... | 45 |
| 3.4.2 Uji Asumsi Klasik | 48 |
| 3.4.3 Pengujian Hipotesis | 49 |
| 3.4 Definisi Operasional Variabel | 51 |
| BAB 4. PEMBAHASAN | 53 |
| 4.1 Gambaran Umum Penyerapan Tenaga Kerja dan Variabel Yang Mempengaruhi di 6 Koridor Ekonomi Indonesia..... | 53 |
| 4.1.1 Gambaran Umum 6 Koridor Ekonomi Indonesia..... | 53 |
| 4.1.2 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia..... | 56 |
| 4.1.3 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia..... | 58 |
| 4.1.4 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di 6 Koridor Ekonomi Indonesia..... | 61 |
| 4.1.5 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di 6 Koridor Ekonomi Indonesia..... | 63 |

| | |
|--|------------|
| 4.1.6 Perkembangan Investasi di 6 Koridor Ekonomi Indonesia | 65 |
| 4.2 Hasil Analisis Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja, UMP, PDRB, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia | 68 |
| 4.2.1 Uji Chow..... | 68 |
| 4.2.2 Uji Hausman..... | 70 |
| 4.2.3 Hasil Regresi Data Panel | 71 |
| 4.2.4 Uji Asumsi Klasik | 79 |
| 4.3 Pembahasan Pengaruh Angkatan Kerja, UMP, PDRB, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia | 84 |
| 4.3.1 Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia | 84 |
| 4.3.2 Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia | 86 |
| 4.3.3 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia.... | 90 |
| 4.3.4 Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia | 93 |
| BAB 5. PENUTUP..... | 97 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 97 |
| 5.2 Saran | 99 |
| DAFTAR PUSTAKA | 100 |
| LAMPIRAN..... | 105 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran di Indonesia pada tahun 2012-2016 (Jiwa)..... | 1 |
| Tabel 1.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pulau dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2016 (Jiwa) | 2 |
| Tabel 1.3 Jumlah Angkatan Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia tahun 2012-2016 (Jiwa)..... | 4 |
| Tabel 1.4 Upah Minimum Provinsi di 6 Koridor Ekonomi Indonesia tahun 2016 (Rupiah) | 5 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 36 |
| Tabel 3.1 Variabel Penelitian..... | 43 |
| Tabel 4.1 Hasil Uji Chow di 6 Koridor Ekonomi Indonesia | 69 |
| Tabel 4.2 Hasil Uji Husman di 6 Koridor Ekonomi Indonesia..... | 70 |
| Tabel 4.3 Hasil Estimasi Metode <i>Fixed Effect</i> di Koridor Sumatera..... | 72 |
| Tabel 4.4 Hasil Estimasi Metode <i>Random Effect</i> di Koridor Jawa..... | 73 |
| Tabel 4.5 Hasil Estimasi Metode <i>Fixed Effect</i> di Koridor Kalimantan | 74 |
| Tabel 4.6 Hasil Estimasi Metode <i>Fixed Effect</i> di Koridor Sulawesi | 75 |
| Tabel 4.7 Hasil Estimasi Metode <i>Fixed Effect</i> di Koridor Bali – Nusa Tenggara..... | 77 |
| Tabel 4.8 Hasil Estimasi Metode <i>Fixed Effect</i> di Koridor Papua – Kepulauan Maluku | 78 |
| Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas di 6 Koridor Ekonomi Indonesia..... | 80 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas di 6 Koridor Ekonomi Indonesia | 81 |
| Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas di 6 Koridor Ekonomi Indonesia | 82 |
| Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi di 6 Koridor Ekonomi Indonesia | 83 |
| Tabel 4.13 Hasil Regresi Variabel Angkatan Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia | 85 |
| Tabel 4.14 Hasil Regresi Variabel Upah Minimum Provinsi di 6 Koridor Ekonomi Indonesia..... | 87 |

| | |
|--|----|
| Tabel 4.15 Hasil Regresi Variabel Produk Domestik Regional Bruto di 6 Koridor Ekonomi Indonesia..... | 91 |
| Tabel 4.14 Hasil Regresi Variabel Investasi di 6 Koridor Ekonomi Indonesia. | 94 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto di 6 Koridor Ekonomi Indonesia tahun 2016 (Miliar Rupiah) | 6 |
| Gambar 1.2 Investasi di 6 Koridor Ekonomi Indonesia tahun 2016 (Miliar Rupiah) | 7 |
| Gambar 2.1 Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja | 10 |
| Gambar 2.2 Kurva Permintaan Tenaga Kerja | 13 |
| Gambar 2.3 Kerangka Desain Pendekatan MP3EI | 16 |
| Gambar 2.4 Fungsi Produksi Harrod-Domar | 32 |
| Gambar 2.5 Kerangka Konseptual | 40 |
| Gambar 3.1 Prosedur Pengujian Pemilihan Model | 47 |
| Gambar 4.1 Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia..... | 54 |
| Gambar 4.2 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia | 57 |
| Gambar 4.3 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia | 59 |
| Gambar 4.4 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di 6 Koridor Ekonomi Indonesia | 61 |
| Gambar 4.5 Perkembangan PDRB di 6 Koridor Ekonomi Indonesia..... | 64 |
| Gambar 4.6 Perkembangan Investasi di 6 Koridor Ekonomi Indonesia..... | 66 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran A.1 Data Penelitian..... | 105 |
| Lampiran A.2 Data Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Angkatan Kerja, UMP, PDRB, dan Investasi di 6 Koridor Ekonomi..... | 107 |
| Lampiran A.3 Data Total Penyerapan Tenaga Kerja, Total Jumlah Angkatan Kerja, Total UMP, Total PDRB, dan Total Investasi di 6 Koridor Ekonomi..... | 117 |
| Lampiran B.1 Hasil Uji Chow Koridor Sumatera..... | 119 |
| Lampiran B.2 Hasil Uji Chow Koridor Jawa..... | 119 |
| Lampiran B.3 Hasil Uji Chow Koridor Kalimantan | 120 |
| Lampiran B.4 Hasil Uji Chow Koridor Sulawesi | 121 |
| Lampiran B.4 Hasil Uji Chow Koridor Bali – Nusa Tenggara..... | 121 |
| Lampiran B.4 Hasil Uji Chow Koridor Papua – Kepulauan Maluku | 122 |
| Lampiran C.1 Hasil Uji Hausman Koridor Sumatera | 123 |
| Lampiran C.2 Hasil Uji Hausman Koridor Jawa | 123 |
| Lampiran C.3 Hasil Uji Hausman Koridor Kalimantan..... | 123 |
| Lampiran C.3 Hasil Uji Hausman Koridor Sulawesi..... | 124 |
| Lampiran C.3 Hasil Uji Hausman Koridor Bali – Nusa Tenggara | 124 |
| Lampiran C.3 Hasil Uji Hausman Koridor Papua – Kepulauan Maluku..... | 125 |
| Lampiran D.1 Hasil Uji Panel Koridor Sumatera | 125 |
| Lampiran D.2 Hasil Uji Panel Koridor Jawa | 126 |
| Lampiran D.3 Hasil Uji Panel Koridor Kalimantan..... | 126 |
| Lampiran D.4 Hasil Uji Panel Koridor Sulawesi..... | 127 |
| Lampiran D.5 Hasil Uji Panel Koridor Bali – Nusa Tenggara | 127 |
| Lampiran D.5 Hasil Uji Panel Koridor Papua – Kepulauan Maluku..... | 128 |
| Lampiran E.1 Uji Asumsi Klasik Koridor Sumatera | 129 |
| Lampiran E.2 Uji Asumsi Klasik Koridor Jawa | 130 |
| Lampiran E.2 Uji Asumsi Klasik Koridor Kalimantan..... | 131 |
| Lampiran E.2 Uji Asumsi Klasik Koridor Sulawesi..... | 132 |

| | |
|--|-----|
| Lampiran E.2 Uji Asumsi Klasik Koridor Bali – Nusa Tenggara | 133 |
| Lampiran E.2 Uji Asumsi Klasik Koridor Papua – Kepulauan Maluku..... | 134 |
| Lampiran F.1 Data Pembahasan Koridor Bali – Nusa Tenggara | 135 |
| Lampiran F.2 Data Pembahasan Koridor Papua – Kepulauan Maluku | 136 |



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk menggerakkan kegiatan ekonominya, sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi, dan teknologi semakin meningkat. Dengan berkembangnya perekonomian ini, maka kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan dalam perekonomian. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2006).

Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang tidak terlepas dari suatu masalah-masalah dalam perekonomian, terutama mengenai masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah mengenai bertambah pesatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran .

Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran di Indonesia Tahun 2012-2016 (Jiwa)

| No. | Tahun | Angkatan Kerja | Pengangguran |
|-----|-------|----------------|--------------|
| 1. | 2012 | 118.053.110 | 7.244.956 |
| 2. | 2013 | 118.192.778 | 7.388.737 |
| 3. | 2014 | 121.872.931 | 7.244.905 |
| 4. | 2015 | 122.380.021 | 7.560.822 |
| 5. | 2016 | 125.443.748 | 7.031.775 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017. (Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkatan kerja di Indonesia pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2012 mencapai 118 juta jiwa, dengan pengangguran sebesar 7,2 juta jiwa. Pengangguran mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi sebesar 7,3 juta. Dan di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 7,2 juta jiwa dikarenakan adanya perbaikan perekonomian di Indonesia setelah adanya dampak dari krisis ekonomi global,

namun pada tahun 2015 pengangguran meningkat kembali menjadi 7,5 juta jiwa. Bertambahnya pengangguran pada tahun 2015 ini disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah perusahaan dikarenakan nilai tukar yang melemah. Selama enam tahun terakhir jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini menunjukkan jumlah penawaran tenaga kerja di dalam pasar bertambah, namun bertambahnya penawaran tenaga kerja ini tidak diimbangi dengan permintaan tenaga kerja sehingga menyebabkan tingginya pengangguran.

Tabel 1.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pulau dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2016

| No. | Pulau | Bekerja | Pengangguran | | | Jumlah Angkatan Kerja |
|-----|------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| | | | Pernah Bekerja | Tidak Pernah Bekerja | Jumlah | |
| 1. | Sumatera | 25.258.225 | 669.705 | 781.864 | 1.451.569 | 26.709.794 |
| 2. | Jawa | 66.820.466 | 2.300.709 | 2.086.404 | 4.387.113 | 71.207.579 |
| 3. | Bali | 2.416.555 | 27.245 | 19.239 | 46.484 | 2.463.039 |
| 4. | Nusa Tenggara | 4.644.378 | 79.096 | 94.505 | 173.601 | 4.817.979 |
| 5. | Kalimantan | 7.355.762 | 225.884 | 203.337 | 429.221 | 7.784.983 |
| 6. | Sulawesi | 8.655.477 | 163.002 | 217.221 | 380.223 | 9.035.720 |
| 7. | Maluku | 1.194.265 | 15.023 | 58.387 | 73.410 | 1.267.675 |
| 8. | Papua | 2.066.845 | 19.501 | 70.633 | 90.134 | 2.156.979 |
| | Indonesia | 118.411.973 | 3.500.185 | 3.531.590 | 7.031.755 | 125.443.748 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017. (Diolah)

Kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2016, diperkirakan jumlah penduduk di Indonesia mencapai 261,1 juta jiwa, dimana 125,4 juta jiwa diantaranya menjadi bagian dari angkatan kerja. Berdasarkan data pada tabel 1.2, dapat dilihat bahwa Pulau Jawa memiliki jumlah angkatan kerja tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 71,2 juta jiwa atau sekitar 56,7% dari seluruh angkatan kerja di Indonesia. Data jumlah tenaga kerja yang bekerja menurut pulau menunjukkan sebagian besar tenaga kerja di Indonesia terserap di Pulau Jawa yaitu sebesar 66,8 juta jiwa atau sekitar 56,4% dari seluruh penduduk bekerja di Indonesia. Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian juga tidak terlepas dari masalah pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Jawa sebesar 6,16% dengan angka tertingginya berada di Provinsi Banten. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di Luar Jawa yaitu di

Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua adalah tercatat sebesar 51,9 juta jiwa atau sekitar 43,6% dari seluruh penduduk bekerja di Indonesia (BPS, 2017).

Jumlah penduduk di Pulau Jawa menurut Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada tahun 2015 adalah sebesar 149.162.161 jiwa atau setara dengan 58,45% dari total Penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah penduduk di Indonesia berada di Pulau Jawa. Pulau Jawa hingga saat ini menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak meratanya pembangunan ekonomi dan menjadikan daerah lainnya menjadi daerah yang tertinggal. Sehingga untuk mendorong pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dibentuklah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang disusun oleh Presiden RI ke – 6.

Salah satu strategi utama MP3EI ini adalah mengembangkan potensi ekonomi wilayah menjadi 6 koridor sesuai dengan potensi-potensi yang terdapat dalam wilayah tersebut. 6 koridor tersebut adalah Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku. Disusunnya masterplan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya dan dapat dibukanya lapangan pekerjaan (MP3EI, 2011).

Jumlah penduduk yang besar menunjukkan adanya potensi tenaga kerja yang besar untuk pembangunan. Namun di sisi lain, bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan berbagai macam masalah apabila tidak diimbangi dengan penambahan lapangan pekerjaan, karena jumlah penduduk yang besar akan menyebabkan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam perekonomian. Untuk melakukan produksi diperlukan tenaga kerja yang tergolong dalam angkatan kerja (Wihastuti, 2018).

Tabel 1.3 Jumlah Angkatan Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2016 (Jiwa)

| No. | Koridor | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Koridor Sumatera | 23.988.869 | 24.189.450 | 25.152.495 | 25.587.918 | 26.707.794 |
| 2. | Koridor Jawa | 69.585.170 | 69.646.482 | 71.128.168 | 70.558.487 | 71.207.579 |
| 3. | Koridor Kalimantan | 6.987.319 | 6.886.626 | 7.265.758 | 7.439.528 | 7.785.013 |
| 4. | Koridor Sulawesi | 7.855.874 | 7.730.176 | 8.313.179 | 7.962.017 | 9.035.720 |
| 5. | Koridor Bali-Nusa Tenggara | 6.562.784 | 6.553.694 | 6.786.006 | 6.935.624 | 7.281.018 |
| 6. | Koridor Papua - Kep. Maluku | 3.073.094 | 3.186.350 | 3.227.345 | 3.396.440 | 3.424.664 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (Diolah).

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2012-2016 menunjukkan adanya penambahan jumlah angkatan kerja. Di tahun 2012 terbesar berada di Koridor Ekonomi Jawa dengan jumlah 69,5 juta jiwa. Terbesar kedua terdapat di Koridor Ekonomi Sumatera dengan jumlah sebesar 23,9 juta jiwa. Dan jumlah angkatan kerja terendah terdapat di Koridor Ekonomi Papua - Kepulauan Maluku. Namun di tahun 2013 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja di beberapa koridor, penurunan ini menunjukkan berhasilnya program KB dari pemerintah sehingga terjadinya penurunan jumlah penduduk. Dan selanjutnya hingga tahun 2016, di Koridor Ekonomi Jawa jumlah angkatan kerja sebesar 71,2 juta jiwa, Koridor Ekonomi Sumatera menjadi 26,7 juta jiwa, Koridor Ekonomi Sulawesi menjadi 9 juta jiwa, Koridor Ekonomi Kalimantan menjadi sebesar 7,7 juta jiwa, di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara menjadi sebesar 7,2 juta jiwa, dan terakhir di Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku menjadi sebesar 3,4 juta jiwa. Jumlah angkatan kerja yang besar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga penyerapan tenaga kerja juga meningkat (Sari, 2017).

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu tujuan pembangunan, pemerintah perlu mengurangi permasalahan mengenai

tenaga kerja. Salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi masalah tenaga kerja yaitu memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha dalam rangka meningkatkan upah perkapita para pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat (Wasilaputri, 2016).

Tabel 1.4 Upah Minimum Provinsi di 6 Koridor Ekonomi Indonesia Tahun 2016 (Rupiah)

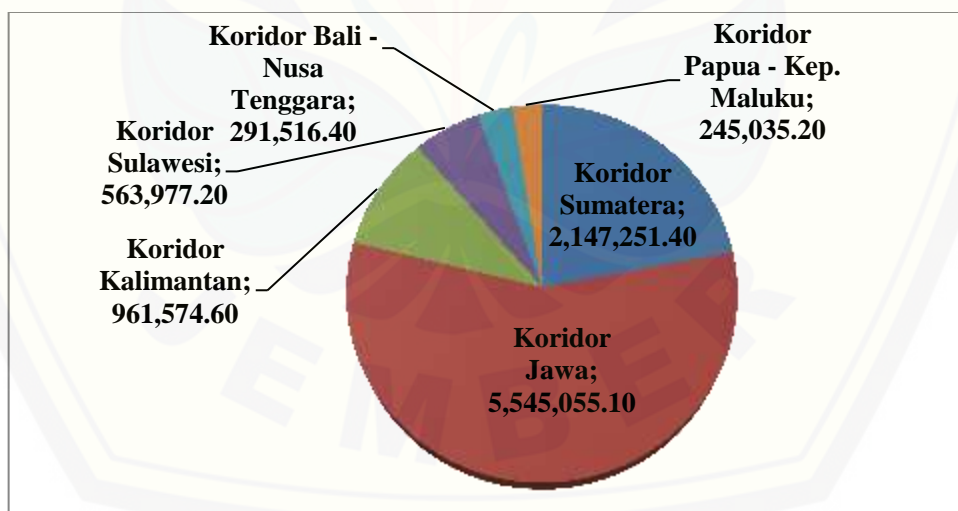
| No. | Koridor | Provinsi | UMP |
|-----|-----------------------------|----------------------|-----------|
| 1. | Koridor Sumatera | Aceh | 2.118.500 |
| | | Sumatera Utara | 2.118.500 |
| | | Sumatera Barat | 1.800.725 |
| | | Riau | 2.095.000 |
| | | Jambi | 1.906.650 |
| | | Sumatera Selatan | 2.206.000 |
| | | Bengkulu | 1.605.000 |
| | | Lampung | 1.763.000 |
| | | Kep. Bangka Belitung | 2.341.500 |
| | | Kep. Riau | 2.178.710 |
| 2. | Koridor Jawa | DKI Jakarta | 3.100.000 |
| | | Jawa Barat | 2.250.000 |
| | | Jawa Tengah | 1.265.000 |
| | | DI Yogyakarta | 1.237.700 |
| | | Jawa Timur | 1.273.490 |
| | | Banten | 1.784.000 |
| 3. | Koridor Kalimantan | Kalimantan Barat | 1.739.400 |
| | | Kalimantan Tengah | 2.057.558 |
| | | Kalimantan Selatan | 2.085.050 |
| | | Kalimantan Timur | 2.161.253 |
| | | Kalimantan Utara | 2.175.340 |
| 4. | Koridor Sulawesi | Sulawesi Utara | 2.400.000 |
| | | Sulawesi Tengah | 1.670.000 |
| | | Sulawesi Selatan | 2.250.000 |
| | | Sulawesi Tenggara | 1.850.000 |
| | | Gorontalo | 1.875.000 |
| | | Sulawesi Barat | 1.864.000 |
| 5. | Koridor Bali-Nusa Tenggara | Bali | 1.807.600 |
| | | Nusa Tenggara Barat | 1.482.950 |
| | | Nusa Tenggara Timur | 1.425.000 |
| 6. | Koridor Papua - Kep. Maluku | Papua | 2.435.000 |
| | | Papua Barat | 2.237.000 |
| | | Maluku | 1.775.000 |
| | | Maluku Utara | 1.681.266 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Berdasarkan Tabel 1.4, dapat dilihat bahwa jumlah UMP berbeda-beda di masing masing provinsi. Karena penetapan upah minimum suatu daerah

didasarkan atas KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Upah minimum cenderung meningkat setiap tahun seiring naiknya upah nominal kesejahteraan (upah riil). UMP terbesar di tahun 2016 terdapat di provinsi DKI Jakarta dengan jumlah UMP sebesar Rp 3.100.000, dan UMP terkecil di tahun 2016 terdapat di provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar Rp 1.237.700. Menurut Alghofari (2010), ditinjau dari sisi pengusaha, kenaikan upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja dengan tujuan untuk mengurangi biaya produksi. Peningkatan upah minimum provinsi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Upah memiliki hubungan terbalik dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga apabila upah meningkat akan mengurangi penyerapan tenaga kerja (Wicaksono, 2010).

Selain upah minimum provinsi, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu Produk Domestik Regional Bruto dan Investasi. Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh daerah dalam tahun tertentu dan biasanya diukur dalam satu tahun.



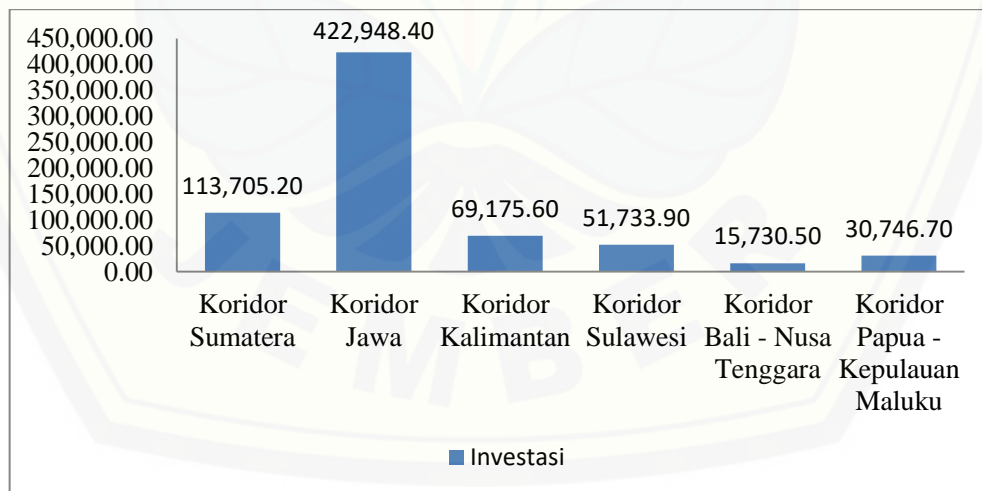
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (Diolah).

Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto di 6 Koridor Ekonomi Indonesia Tahun 2016 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa Koridor Ekonomi Jawa menyumbang PDRB terbesar yaitu dengan jumlah Rp 5.545 miliar rupiah atau sebesar 57% dari total seluruh PDRB di Indonesia, dan di posisi kedua terdapat

Koridor Ekonomi Sumatera dengan jumlah PDRB sebesar Rp 2.147,2 miliar rupiah. Selanjutnya terdapat Koridor Ekonomi Kalimantan dengan jumlah PDRB sebesar Rp 961,5 miliar rupiah, dan Koridor Ekonomi Sulawesi dengan PDRB sebesar Rp 563,9 miliar rupiah. Dan terdapat Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara dengan jumlah PDRB sebesar Rp 291,5 miliar rupiah, dan terakhir terdapat Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku dengan jumlah PDRB sebesar Rp 245 miliar rupiah.

PDRB dapat mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja, apabila PDRB meningkat maka nilai tambah output atau penjualan seluruh unit ekonomi suatu wilayah akan meningkat, semakin besar output yang dihasilkan suatu perusahaan akan mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja agar produksinya akan meningkat dan dapat mengejar penjualan yang terjadi (Feriyanto, 2014). Selanjutnya, faktor investasi secara langsung dapat meningkatkan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi tersebut akan meningkatkan permintaan faktor produksi, termasuk tenaga kerja (Wasilaputri, 2016). Kegiatan investasi dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (Diolah).

Gambar 1.2 Investasi di 6 Koridor Ekonomi Indonesia Tahun 2016 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, investasi di Koridor Jawa merupakan investasi tertinggi dibandingkan dengan investasi di koridor lainnya. Investasi di Koridor Jawa tahun 2016 adalah sebesar Rp 422,9

triliun. Sedangkan investasi di Koridor Sumatera sebesar Rp 113,7 triliun, Koridor Kalimantan sebesar Rp 69,2 triliun, Koridor Sulawesi sebesar Rp 51,7 triliun, Koridor Bali – Nusa Tenggara sebesar Rp 15,7 triliun, serta Koridor Papua – Kepulauan Maluku sebesar Rp 30,7 triliun (Rachman, 2016). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chusna (2013), menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melihat pengaruh Jumlah Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia yaitu Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh Jumlah Angkatan Kerja terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia tahun 2007-2016?
- b. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia tahun 2007-2016?
- c. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia tahun 2007-2016?
- d. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia tahun 2007-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Angkatan Kerja terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia tahun 2007-2016.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia tahun 2007-2016.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia tahun 2007-2016.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia tahun 2007-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik manfaat penelitian ini adalah memberikan sumbangan pengetahuan lebih mendalam mengenai penyerapan tenaga kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat berguna untuk Pemerintah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan sebagai upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tenaga Kerja

a. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun atau lebih, sedangkan penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun digolongkan bukan tenaga kerja.

Menurut Simanjuntak (1998), tenaga kerja merupakan suatu penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan atau disebut pencari kerja, atau sedang melaksanakan kegiatan yang lainnya seperti sekolah ataupun mengurus rumah tangga yang walaupun mereka tidak bekerja mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu bisa atau dapat ikut bekerja. Gambar komposisi tenaga kerja :



Sumber: Simanjuntak, 1998.

Gambar 2.1 Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja

b. Klasifikasi Tenaga Kerja

1) Berdasarkan Penduduknya

a) Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia 15 – 64 tahun.

b) Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja yaitu mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka adalah yang berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun. Contohnya adalah pensiunan, anak-anak, para lansia.

2) Berdasarkan Batas Kerja

a) Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

b) Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun keatas yang kegiatannya hanya sekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Contohnya yaitu anak sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga, maupun para penganggur sukarela.

3) Berdasarkan Kualitasnya

a) Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal maupun informal. Contohnya : pengacara, guru, dokter, dan lainnya.

b) Tenaga Kerja Terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini

dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya yaitu mekanik, apoteker, dan lainnya.

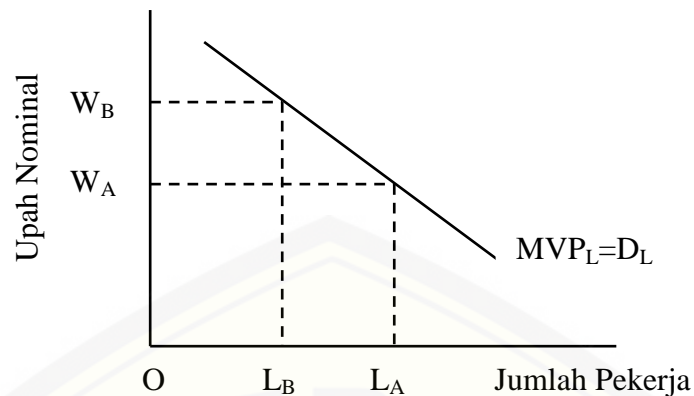
2.1.2 Permintaan Tenaga Kerja

a) Pengertian Permintaan Tenaga Kerja

Menurut Sudarsono dalam Sholeh (2007), dalam suatu konteks ekonomi, permintaan didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki oleh pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara besarnya tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh suatu perusahaan untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan suatu perusahaan pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam suatu waktu tertentu (Sholeh, 2007).

Menurut Buediono (1991), permintaan tenaga kerja selain dari derived demand dari permintaan barang dan jasa, permintaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Terdapat teknologi yang justru mengurangi permintaan tenaga kerja (seperti penambahan mesin-mesin industri), yang dapat menaikkan output tetapi mengurangi penggunaan tenaga kerja. Sedangkan penambahan penggunaan tenaga kerja untuk menaikkan output disebut padat karya.

Susanto (2015), menjelaskan bahwa penambahan seorang pekerja akan menambah output sebesar produk marjinal tenaga kerja (MP_L). Pada pasar persaingan sempurna, dengan tingkat harga produk setinggi P_Q , maka nilai produk marjinal tenaga kerja (MVP_L) adalah output dikalikan produk marjinal ($P_Q \times MVP_L$). Penambahan seorang pekerja membebani biaya perusahaan sebesar tingkat upah nominal pekerja (W). Apabila nilai produk marjinal tenaga kerja (MVP_L) lebih tinggi daripada tingkat upah nominal (W), maka perusahaan akan menambah jumlah pekerja, dan sebaliknya. Berikut adalah kurva permintaan tenaga kerja.



Sumber : Susanto, 2015.

Gambar 2.2 Kurva Permintaan Tenaga Kerja

Penambahan jumlah pekerja diikuti dengan penurunan nilai produk marjinal pekerja (MVP_L) sehingga upah nominal juga mengalami penurunan. Kenaikan upah nominal akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta, dan sebaliknya. Pada tingkat upah nominal setinggi OW_A , maka jumlah tenaga kerja yang diminta sebesar OL_A . Sedangkan apabila upah nominal naik menjadi W_B akan menyebabkan berkurangnya jumlah tenaga kerja yang diminta menjadi OL_B .

b) Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja

Menurut Feriyanto (2014), faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1) Upah Tenaga Kerja

Upah adalah pendapatan seorang tenaga kerja yang telah memberikan jasanya kepada perusahaan. Bagi perusahaan upah adalah suatu pengeluaran dari pembayaran faktor input produksi yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya produksi suatu perusahaan. Semakin tinggi upah tenaga kerja maka akan mengakibatkan permintaan tenaga kerja akan turun. Turunnya permintaan tenaga kerja dikarenakan ketika tingkat upah naik maka biaya produksi akan meningkat sehingga ini akan berdampak pada naiknya harga per unit produksi. Ketika harga barang naik biasanya konsumen akan mengurangi konsumsinya dan banyak barang produksi yang tidak terjual sehingga perusahaan akan

mengurangi jumlah produksi mereka, dan turunnya jumlah produksi ini menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja.

2) Penjualan Produk

Penggunaan tenaga kerja oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap tingkat volume atau penjualan produk. Semakin besar penjualan produk yang dilakukan oleh perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya semakin ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi.

3) Tingkat Bunga

Tingkat bunga yang rendah akan mendorong perusahaan untuk memperluas usaha dan melakukan tambahan investasi. Sehingga dengan pertambahan investasi yang dilakukan oleh perusahaan nantinya perusahaan akan dapat meningkatkan produksi dan perusahaan memerlukan tambahan faktor produksi termasuk juga tenaga kerja, sehingga nantinya akan meningkatkan permintaan tenaga kerja.

2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Todaro (2003), penyerapan tenaga kerja didefinisikan sebagai diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerjaan atau lapangan pekerjaan untuk dapat diisi oleh para pencari kerja. Penyerapan tenaga kerja secara umum menunjukkan besarnya kemampuan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan produk.

Penyerapan tenaga kerja juga dapat diartikan banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah angkatan kerja yang bekerja. Penduduk terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian (Kuncoro, 2002). Terserapnya penduduk di berbagai sektor perekonomian disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Sehingga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja juga akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai kemampuan lapangan kerja dalam menyerap tenaga kerja yang memenuhi kriteria pada lapangan tersebut. Jumlah penyerapan tenaga kerja dapat sama atau bahkan lebih kecil dari jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Apabila jumlah kesempatan kerja sama dengan penyerapan kerja maka tidak terjadi pengangguran. Namun, apabila jumlah penyerapan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah kesempatan kerja maka akan terjadi pengangguran (Feriyanto, 2014).

2.1.4 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2014 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 menyatakan bahwa MP3EI merupakan arahan strategis percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode lima belas (15) tahun terhitung sejak 2011 sampai dengan tahun 2025, dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan cetak biru mengenai strategi pemerintah dalam memajukan perekonomian Indonesia. Penyusunan MP3EI ini merupakan inisiatif dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan pada tanggal 30 Desember 2010 untuk memberikan arahan pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025. Visi MP3EI selaras dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yakni “ Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur” (MP3EI, 2011).



Sumber : Masterplan P3EI, 2011.

Gambar 2.3 Kerangka Desain Pendekatan MP3EI

Berdasarkan Gambar 2.3, terdapat tiga strategi utama dalam Masterplan P3EI ini. Pertama, yaitu pengembangan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi serta menggali potensi dan keunggulan daerah dan juga untuk memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia. Kedua, penguatan konektivitas nasional, ini merupakan pengintegrasian 4 elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional, Sistem Transportasi Nasional, Pengembangan Wilayah, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ketiga, kemampuan SDM dan Iptek nasional, dengan sistem pendidikan dan pelatihan harus bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin lama semakin maju. Selanjutnya prasyarat dan serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan MP3EI.

Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi menjadi salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama). Pembangunan koridor ini dapat diartikan sebagai pengembangan wilayah untuk menciptakan dan memberdayakan basis ekonomi terpadu dan kompetitif serta berkelanjutan. Pembangunan koridor ekonomi di Indonesia dilakukan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan memperhitungkan berbagai potensi

dan peran strategis masing-masing pulau besar, telah ditetapkan 6 (enam) koridor ekonomi dengan tema pembangunan masing-masing koridor ekonomi sebagai berikut (MP3EI, 2011) :

1. Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”; dalam Koridor Sumatera ini terdapat 10 Provinsi di dalamnya, antara lain : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
2. Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”; dalam Koridor Jawa ini terdapat 6 Provinsi di dalamnya, antara lain : DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.
3. Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”; dalam Koridor Kalimantan ini terdapat 5 Provinsi di dalamnya, antara lain : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
4. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”; dalam Koridor Sulawesi ini terdapat 6 Provinsi di dalamnya, antara lain : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.
5. Koridor Ekonomi Bali - Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai “Pintu Gerbang Wisata dan Pendukung Pangan Nasional”; dalam Koridor Bali - Nusa Tenggara ini terdapat 3 Provinsi di dalamnya, antara lain : Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
6. Koridor Ekonomi Papua - Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”. dalam Koridor Papua - Kepulauan Maluku ini terdapat 4 Provinsi di dalamnya, antara lain : Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

2.1.5 Angkatan Kerja

a. Pengertian Angkatan Kerja

Angkatan kerja (*labour force*) merupakan sebagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia. Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung dengan komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan menghasilkan jumlah angkatan kerja yang besar pula. Angkatan kerja yang besar diharapkan mampu memacu peningkatan kegiatan ekonomi yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Djojohadikusumo, 1987).

Angkatan kerja dapat didefinisikan sebagai penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Atau penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi angkatan kerja antara lain (Sari, 2017):

1. Jumlah dan sebaran usia penduduk, penduduk yang memiliki usia melebihi dari batas yang ditentukan maka dianggap masuk ke dalam usia kerja. Misalnya anak yang berusia 10 tahun tetapi aktif dalam bekerja dikatakan bagian dari angkatan kerja.
2. Pengaruh keaktifan bersekolah terhadap penduduk usia kerja. Ini misalnya, penduduk usia muda yang masih bersekolah tidak dianggap sebagai angkatan kerja walaupun usia penduduk tersebut bagian dari usia orang yang sudah mulai bekerja.
3. Peranan kaum wanita dalam perekonomian, jika wanita tersebut bekerja mengurus rumah tangga maka dianggap bukan angkatan kerja. Namun jika seorang wanita memiliki pekerjaan tertentu diluar rumah maka dianggap sebagai angkatan kerja.
4. Pertambahan penduduk yang tinggi, setiap terjadinya pertambahan penduduk maka akan meningkatkan jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja.

5. Meningkatnya jaminan kesehatan, ketika jaminan kesehatan meningkat maka rata-rata umur penduduk akan bertambah sehingga akan memperpanjang masa produktif penduduk untuk pekerjaannya, sehingga akan menambah jumlah angkatan kerja.

b. Teori Tentang Angkatan Kerja

Teori pertumbuhan ekonomi berkembang sejak tahun 1950-an yang berkembang berdasarkan analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi. Adam Smith merupakan pelopor pembangunan ekonomi dan kebijakan *laissez-faire*, tetapi juga merupakan ekonom pertama yang banyak menumpahkan perhatian kepada masalah pertumbuhan ekonomi. Inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dibedakan menjadi dua aspek utama, antara lain (Arsyad, 1997):

- Pertumbuhan output total,
- Pertumbuhan penduduk

Menurut Adam Smith, sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar bagi kegiatan produksi dalam masyarakat. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya maka jumlah penduduk dan stok modal yang memegang peranan dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Menurut Adam Smith, sumberdaya manusia (jumlah penduduk) yang efektif merupakan pemula dari pertumbuhan ekonomi. Sumberdaya manusia memiliki peran yang pasif dalam proses pertumbuhan output yang artinya jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Setelah perekonomian tumbuh, akumulasi modal mulai dibutuhkan untuk menjaga agar perekonomian tetap tumbuh. Atau dengan kata lain, alokasi sumberdaya manusia yang efektif merupakan syarat yang diperlukan bagi suatu pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan untuk menciptakan suatu output dalam masyarakat dibutuhkan sumberdaya manusia yang sebagai tenaga kerja yang digunakan sebagai salah satu faktor produksi (Arsyad, 1997).

Sedangkan menurut Simanjuntak (1998), tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan bekerja dan golongan yang menganggur dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam perekonomian. Untuk melakukan produksi diperlukan tenaga kerja yang tergolong dalam angkatan kerja, karena angkatan kerja ini merupakan tenaga kerja yang sudah memasuki usia bekerja (15 tahun keatas) dan diperlukan dalam suatu perekonomian untuk menghasilkan output produksi untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat.

c. Hubungan Jumlah Angkatan Kerja terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh terhadap besarnya jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jumlah angkatan kerja dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia penduduk, dan tingkat pendidikan. Jumlah angkatan kerja yang besar bermanfaat dalam peningkatan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penyerapan tenaga kerja merupakan menunjukkan ketersediaannya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Permasalahan mengenai angkatan kerja yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dapat diatasi dengan beberapa program pemerintah seperti program KB, wajib belajar 9 tahun, dan juga pemberdayaan angkatan kerja dengan cara mengirim angkatan kerja ke daerah-daerah yang kekurangan angkatan kerja. Sehingga ketika angkatan kerja yang dihasilkan baik atau berkualitas maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja.

Dalam penelitian Sari (2017), menunjukkan jumlah angkatan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Yang artinya semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja dengan strata pendidikan yang lebih baik dari tahun ke tahun dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dan angkatan kerja yang besar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga penyerapan tenaga kerja juga meningkat.

2.1.6 Upah

a. Pengertian Upah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1, menyebutkan :

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Menurut Simanjuntak (2001), upah merupakan imbalan yang diterima orang atau jasa kerja yang diberikan bagi pihak lain, diberikan seluruhnya dalam bentuk uang atau sebagian dalam bentuk natura. Kenaikan upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, artinya akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Demikian pula sebaliknya, dengan turunnya tingkat upah akan diikuti oleh meningkatkan kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja memiliki hubungan terbalik dengan tingkat upah. Kenaikan tingkat upah yang disertai oleh penambahan tenaga kerja hanya akan terjadi bila suatu perusahaan mampu meningkatkan harga jual barang.

Selanjutnya, pengertian upah menurut teori ekonomi dalam Sukirno (2016), yaitu pembayaran yang diperoleh para pekerja atas berbagai bentuk jasa (baik jasa fisik ataupun mental) yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Para ahli ekonomi membuat perbedaan antara dua pengertian upah, yaitu upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima oleh para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental ataupun tenaga fisik para pekerja yang digunakan sebagai faktor produksi dalam proses produksi. Sedangkan upah riil adalah tingkat upah para pekerja yang diukur dari sudut bagaimana kemampuan upah tersebut dapat digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

b. Upah Minimum

Upah minimum di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Definisi upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Karena pemenuhan kebutuhan layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut upah minimum provinsi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektor, meskipun saat ini baru upah regional yang dimiliki setiap daerah. Jenis-jenis upah minimum terdiri dari (Setiawan, 2018):

- Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi. Upah minimum ini ditetapkan oleh Gubernur dalam satu tahun sekali berdasarkan rekomendasi dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi).
- Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota. Upah minimum kabupaten/kota ini ditetapkan oleh Gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum provinsi. Penetapan upah ini dilakukan selama satu tahun sekali.
- Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral dalam satu provinsi. Upah minimum sektoral provinsi ini hanya berlaku untuk beberapa sektor bisnis tertentu saja.
- Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota. Upah minimum sektoral kabupaten/kota ini hanya berlaku untuk beberapa sektor bisnis tertentu saja.

Dasar kebijakan upah minimum diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, yaitu penetapan upah minimum didasarkan atas KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum cenderung meningkat setiap tahun seiring naiknya upah nominal kesejahteraan (upah riil).

Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 maka upah pekerja disebut dengan istilah UMR atau UMP. UMP dapat diartikan sebagai suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawainya sesuai dengan ketentuan provinsi tempat perusahaan itu berada. Sehingga penetapan upah minimum bertujuan untuk menjamin penghasilan para pekerja agar tidak lebih dari suatu tingkat tertentu (Sumarsono, 2009).

c. Teori Tentang Upah

- Teori Upah David Ricardo

Menurut teori David Ricardo, penduduk atau angkatan kerja meningkat atau menurun tergantung pada apakah tingkat upah di atas atau di bawah tingkat upah minimal (Arsyad, 1997). David Ricardo menciptakan teori upah alamiah (substansi) dengan memanfaatkan hukum penawaran dan permintaan. Menurut Richardo, jika upah pekerja suatu waktu cukup tinggi, maka para pekerja akan cenderung melakukan pernikahan karena upahnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Akibatnya tingkat kelahiran akan meningkat dan nantinya akan meningkatkan pertumbuhan penduduk terutama angkatan kerja yang mencari lapangan pekerjaan sehingga disini penawaran tenaga kerja akan meningkat.

Kondisi tersebut akan berlanjut sampai para pencari kerja bersedia diberi upah serendah mungkin ke tingkat alamiah (substansi). Ketika upah berada di tingkat substansi, maka para pekerja akan sedikit yang melakukan pernikahan dan nantinya akan berdampak pada menurunnya tingkat kelahiran dan berakibat pada menurunnya jumlah penduduk sehingga mengurangi jumlah angkatan kerja yang ada dan hal ini akan menyebabkan bertambahnya permintaan tenaga kerja. (Sihotang, 2007).

- Teori Upah Karl Marx

Teori upah menurut Karl Marx dalam Simanjuntak (1998), buruh merupakan sumber nilai ekonomi. Jadi nilai suatu barang adalah nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu kerja yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Karl Marx berpandangan bahwa upah pekerja dinilai berdasarkan berapa

dia bekerja per-hari. Namun kenyataannya buruh masih banyak yang dibayar rendah sehingga tidak cukup mengembalikan energi yang mereka gunakan. Energi yang tidak terbayar inilah disebut sebagai nilai lebih menurut Karl Marx. Teori upah Karl Marx juga didasari pada teori pertentangan kelas. Karl Marx berkeyakinan bahwa kapitalis selalu berusaha menciptakan barang-barang modal untuk mengurangi penggunaan buruh, sehingga berakibat meningkatnya penawaran di pasar kerja sehingga upah cenderung menurun. Sehingga konsekuensi dari sistem ini adalah tidak ada jalan lain bagi buruh kecuali bersatu merebut kapital dari pengusaha menjadi milik bersama.

Implikasi pandangan Marx tersebut dalam sistem pengupahan dan pelaksanaannya adalah :

- Kebutuhan konsumsi tiap orang baik jenis dan jumlahnya hampir sama. Begitu juga nilai (harga) setiap barang hampir sama, sehingga upah tiap-tiap orang hampir sama.
- Sistem pengupahan tidak memberikan insentif yang sangat perlu menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.
- Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang benar-benar mau bekerja sesuai kemampuannya.

Sehingga dengan berpedoman pada pandangan Karl Marx, tingkat upah dalam ekonomi sosialisme ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah nantinya menentukan berapa tingkat upah yang diterima oleh seorang pekerja. Pertimbangan penentuan upah oleh pemerintah pada dasarnya sesuai dengan kepentingan pemerintah, yang dapat beraspek ekonomi maupun politik. Upah yang ditetapkan bisa saja di atas atau di bawah harga pasar. Meskipun tujuan sosialisme adalah untuk memberikan tingkat kesejahteraan yang merata bagi masyarakat, namun di dunia nyata nasib para pekerja tidak lebih baik daripada dalam kapitalisme.

- Teori Upah Menurut Pertambahan Produk Marginal

Menurut pandangan Neo Klasik menyebutkan bahwa untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan-perusahaan, tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga faktor produksi

yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Teori produktifitas marginal menyatakan bahwa biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut (Sukirno, 2016).

d. Hubungan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Sumarsono (2009) dalam Sari (2017), naiknya tingkat upah akan berpengaruh terhadap jumlah biaya yang ditanggung oleh perusahaan terutama biaya produksinya. Apabila tingkat upah naik akan menyebabkan beberapa hal, antara lain:

- Hubungan Penurunan

Ketika tingkat upah naik maka akan menaikkan biaya produksi, sehingga juga akan menaikkan harga barang per unitnya. Dan ketika harga naik, para konsumen akan cepat memberikan respon yaitu mengurangi barang yang dikonsumsi dan ini akan berdampak pada perusahaan yaitu banyaknya barang yang tidak terjual sehingga perusahaan akan mengurangi jumlah produksinya. Dengan berkurangnya jumlah produksi maka akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akibat dari menurunnya skala produksi pada perusahaan tersebut.

Ketika tingkat upah naik, akan terdapat beberapa perusahaan yang memilih untuk menggunakan teknologi daripada tenaga kerja manusia, sehingga beralih pada mesin sebagai alat produksinya dan ini akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

- Hubungan Peningkatan

Peningkatan upah akan mempengaruhi daya beli masyarakat, meningkatnya upah mempengaruhi daya beli masyarakat karena pendapatan mereka lebih besar dan besarnya daya beli ini memberikan keuntungan besar kepada perusahaan sehingga perusahaan dapat menambah perusahaan baru yang memerlukan

tambahan pekerja untuk memenuhi tambahan jumlah unit barang yang meningkat karena meningkatnya daya beli masyarakat akibat dari tingginya upah. Sehingga naiknya tingkat upah dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja.

2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto

a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan indikator yang digunakan untuk melihat kinerja ekonomi suatu wilayah dalam suatu negara tertentu digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengertian Produk Domestik Regional Bruto menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh daerah dalam tahun tertentu dan biasanya diukur dalam satu tahun. PDRB digunakan untuk berbagai tujuan dan dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah output yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu regional atau provinsi di suatu negara. PDRB itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku adalah PDRB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung memakai harga tahun tertentu sebagai tahun dasar (BPS Indonesia, 2013).

Pada tahun 2010, Badan Pusat Statistik mengubah harga tahun dasar, yang semula tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010. Tahun 2010 dipilih untuk menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan sebagai berikut:

- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama sepuluh tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru.
- Teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan dan metodologi sesuai rekomendasi dalam *System of National Account (SNA) 2008*.

- Perekonomian Indonesia relatif stabil.

Menurut Tarigan (2007), terdapat 3 (tiga) pendekatan untuk menghitung PDRB dengan menggunakan metode langsung, antara lain:

1. Pendekatan Pengeluaran

Pendapatan pengeluaran merupakan penentuan pendapatan regional dengan cara menjumlahkan seluruh nilai penggunaan akhir dari barang maupun jasa yang diproduksi dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan, maka total keseluruhan dari produksi barang dan jasa tersebut digunakan untuk konsumsi:

- Rumah tangga;
- Konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan;
- Konsumsi pemerintah;
- Pembentukan modal tetap bruto (investasi);
- Perubahan stok;
- Ekspor netto (total ekspor dikurangi total impor);

2. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi merupakan cara penentuan pendapatan regional yang dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh masing-masing sektor perekonomian, oleh karena itu untuk menghitung pendapatan regional dengan menggunakan pendekatan produksi langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan nilai produksi dari masing-masing sektor tersebut.

3. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang diterima adalah upah, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan dikurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam penghitungan PDRB kecuali balas jasa faktor produksi termasuk komponen penyusutan dan pajak tak langsung netto. Seluruh komponen pendapatan ini secara sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto.

b. Teori Tentang Produk Domestik Regional Bruto

Dalam Arsyad (1998), menyebutkan bahwa teori pertumbuhan Neo Klasik (Solow-Swan) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat diukur dengan pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi ini bergantung kepada faktor-faktor produksi berupa kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal, serta penyempurnaan teknologi. Pertumbuhan suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni: akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Menurut teori ini, rasio modal-output bisa berubah atau untuk menciptakan sejumlah output tertentu bisa menggunakan jumlah modal berbeda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya bisa berbeda juga. Sehingga dengan fleksibilitas ini suatu perekonomian bebas menentukan kombinasi modal serta tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan output (PDRB).

Teori Neo Klasik mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya mereka menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas, fungsinya dituliskan dengan cara berikut ini (Arsyad, 1998):

$$Q_t = T_t^a K_t L_t^b$$

Di mana:

Q_t = tingkat produksi pada tahun t

T_t = tingkat teknologi pada tahun t

K_t = jumlah stok barang modal pada tahun t

L_t = jumlah tenaga kerja pada tahun t

a = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal

b = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja

Berdasarkan pada fungsi produksi tersebut bahwa untuk mendapatkan hasil *output* (PDRB) pada tahun tertentu atau dilambangkan dengan Q_t maka dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor produksi (*input*) antara lain: pertambahan output akibat pertambahan teknologi pada tahun tertentu (T_t^a), jumlah stok barang modal pada tahun tertentu atau dilambangkan dengan (K_t), dan pertambahan output akibat bertambahnya jumlah tenaga kerja pada tahun tertentu atau

dilambangkan dengan (L_t^b). Sehingga peningkatan atau penurunan jumlah tenaga kerja mempengaruhi peningkatan atau penurunan kualitas serta kuantitas produksi *output* (Q) dalam suatu perusahaan yang dalam hal ini disebutkan sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

c. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kinerja ekonomi suatu wilayah dalam suatu negara. PDRB dapat diartikan sebagai keseluruhan nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai macam aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam suatu wilayah. Disebut domestik karena ini berhubungan dengan batas wilayah, sedangkan disebut bruto dikarenakan dalam penghitungannya memasukkan komponen penyusutan. PDRB secara umum disebut sebagai agregat ekonomi dimana angka besaran totalnya menunjukkan besarnya ekonomi suatu wilayah, dan agregat ekonomi ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi memerlukan tambahan tenaga kerja yang digunakan sebagai faktor produksi guna memenuhi permintaan agregat yang meningkat. Dalam kondisi seperti ini akan terjadi pada struktur perekonomian yang bersifat padat karya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena tersedianya lowongan pekerjaan sehingga akan mengurangi pengangguran. Dengan kata lain, tenaga kerja yang terserap oleh perusahaan akan menciptakan kesejahteraan penduduk (Arsyad, 1998).

2.1.7 Investasi

a. Pengertian Investasi

Menurut Sukirno (1999), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia di dalam perekonomian. Sukirno juga menjelaskan bahwa investasi atau bisa disebut sebagai penanaman modal merupakan pengeluaran sektor perusahaan untuk

membeli atau memperoleh barang-barang modal baru yang lebih modern untuk menggantikan barang-barang modal yang sudah lama tidak dipergunakan lagi atau yang telah usang. Investasi ini perlu dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin agar proses produksinya tetap mengalami kemajuan sehingga perusahaan tersebut dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Investasi meliputi penambahan stok modal atau barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi pada hakikatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah, atau kerja sama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang dan dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003).

Jenis-jenis investasi antara lain :

1) Investasi Dalam Negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan modal dalam negeri adalah bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki negara maupun swasta nasional maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disediakan guna menjalankan suatu usaha. Penanaman modal dalam negeri juga dapat diartikan sebagai modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

2) Investasi Asing atau Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara asing. Penanaman modal asing merupakan kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam asing, yang modalnya menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

b. Teori Tentang Investasi

Dalam Boediono (1981), teori ekonomi Harrod-Domar menekankan pentingnya suatu investasi (I) dalam suatu perekonomian jangka panjang. Menurut Harrod-Domar, Investasi (I) mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat melalui proses multiplier, dan mempunyai pengaruh terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam jangka panjang, investasi (I) akan menambah modal misalnya pabrik-pabrik, jalan, dan sebagainya. Sehingga investasi merupakan jumlah pertambahan stok kapital dalam masyarakat. Menurut Harrod-Domar, penambahan stok kapital masyarakat (K) akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output (Q^p). Q^p ini merupakan output potensial yang bisa dihasilkan dengan stok kapital (kapasitas pabrik) yang ada.

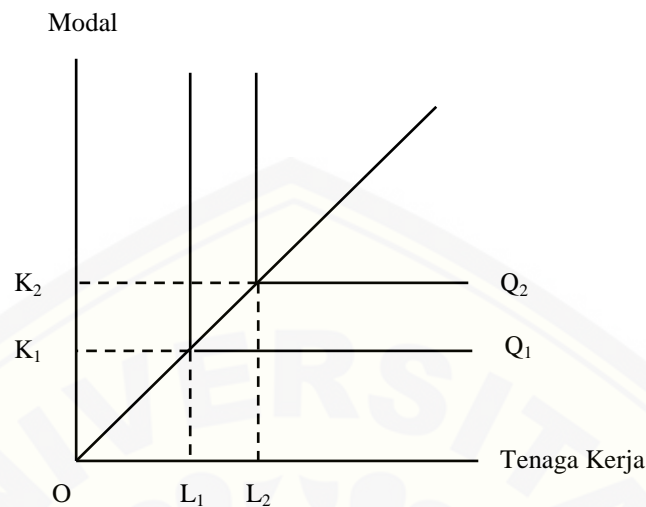
Harrod-Domar memberikan gambaran sederhana hubungan antara K dan Q^p yaitu:

$$Q^p = hK$$

Disini h menunjukkan berapa unit output yang bisa dihasilkan dengan setiap penggunaan 1 unit kapital. Hubungan K dan Q^p adalah proporsional yaitu misalkan K naik dua kali lipat maka Q^p juga naik dua kali lipat. Sehingga ketika dalam satu tahun terdapat investasi sebesar I, maka stok kapital pada akhir tahun akan bertambah sebesar $\Delta K = I$.

Pembentukan modal akan dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Menurut Harrod-Domar ketidakstabilan perekonomian tidak dapat terelakkan dan akan mengganggu keseimbangan (*full employment*) sehingga intervensi pemerintah sangat diperlukan. Dalam teori Harrod-Domar ini, fungsi produksinya berbentuk L karena sejumlah modal hanya akan menciptakan suatu tingkat output tertentu (modal dan tenaga kerja tidak substitutif).

Berikut gambar fungsi produksi Harrod-Domar :



Sumber : Lincoln Arsyad, 1997.

Gambar 2.4 Fungsi Produksi Harrod-Domar

Berdasarkan Gambar 2.4, dapat dilihat bahwa untuk menghasilkan output sebesar Q_1 diperlukan modal K_1 dan tenaga kerja L_1 , dan apabila kombinasi itu berubah maka tingkat output berubah. Misalnya untuk menghasilkan output Q_2 akan tercipta jika jika terdapat penambahan tenaga kerja sebesar L_2 dan modal sebesar K_2 .

c. Hubungan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Investasi merupakan salah satu faktor yang mempunyai tingkat produksi dan mempunyai efek ganda yang akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Dengan demikian investasi memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan investasi akan berdampak pada pertumbuhan pendapatan nasional. Dengan memperhitungkan efek pengganda, maka besarnya persentase pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan menjadi lebih besar dari besarnya persentase pertumbuhan investasi (Mankiw, 2003).

Dalam teori Investasi Harrod-Domar, selain untuk menciptakan permintaan, investasi juga dapat memperbesar kapasitas produksi. Salah satu faktor produksi yang perlu ditingkatkan penggunaannya adalah tenaga kerja. Dengan penggunaan

kapital yang semakin besar, maka akan memperbesar penggunaan tenaga kerja dan juga akan menghasilkan output yang semakin besar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Arifatul Chusna (2013) dengan judul “*Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011*” yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dan pengaruh pertumbuhan sektor industri, investasi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan laju pertumbuhan sektor industri tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, sedangkan investasi dan upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Jawa Tengah

Penelitian dari Arif Budiarto dan Made Heny Urmila Dewi (2014) dengan judul “*Pengaruh PDRB dan UMP terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Mediasi Investasi di Provinsi Bali*” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB dan UMP terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Mediasi Investasi di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan PDRB berpengaruh terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja, UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja. Dan Investasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Investasi di sini bukan variabel mediasi UMP terhadap penyerapan tenaga kerja, dan bukan variabel mediasi PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penelitian dari Sri Novi Hardiyanti (2014) dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1998-2012*” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Inflasi, PDRB, UMP, dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan Inflasi dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan Investasi berpengaruh negatif dan UMR berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

Penelitian dari Febryana Rizqi Wasilaputri (2016) dengan judul “*Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014*” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh UMP, PDRB, dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Hasil penelitian menunjukkan UMP secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan, PDRB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan, dan investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan secara simultan UMP, PDRB, dan Investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

Penelitian dari Tri Kartika Sari (2017) dengan judul “*Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2007-2016*” yang bertujuan untuk mengetahui determinan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. IPM berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan angkatan kerja dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Penelitian dari Fadilah Putri Arafah (2018) dengan judul “*Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau*” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan Angkatan Kerja, PDRB dan Tingkat Pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan UMP berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau.

Penelitian dari Rudi Hartono, Arfiah Busari, dan Muhammad Awaluddin (2018) dengan judul “*Pengaruh PDRB dan UMK terhadap Penyerapan Tenaga Kerja*” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB dan UMP terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan variabel PDRB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan UMP berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda Kalimantan Timur.

Penelitian dari T. H. Gindling dan Katherine Terrel (2006) dengan judul *“The Effect of Multiple Minimum Wages Throughout the Labor Market : The Case of Costa Rica”* yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggandaan upah minimum terhadap pasar tenaga kerja yang berada di Kosta Rika. Hasil penelitian menunjukkan kenaikan upah 10% akan menurunkan tingkat pekerjaan di sektor tertutup sebesar 1,09% dan menurunkan jumlah rata-rata jam kerja yang bekerja di sektor tertutup sebesar 0,6%. Namun tidak berdampak signifikan terhadap jumlah jam kerja di Kosta Rika.

Penelitian dari Leif Danziger (2009) dengan judul *“Noncompliance and the Effect of the Minimum Wage on Hours and Welfare in Competitive Labor Markets”* yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh upah minimum terhadap jam kerja dan kesejahteraan pekerja pada pasar kerja yang kompetitif. Hasil penelitian menunjukkan upah minimum dapat mengurangi jumlah pekerja, mengurangi jam kerja, mengurangi keuntungan yang diharapkan oleh pengusaha, namun dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Penelitian dari David A. Mayom (2015) dengan judul *“The Impact of Foreign Direct Investment on Labor Market Measures : Evidence from Sub-Saharan Africa.”* yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat bunga, investasi asing langsung terhadap pasar kerja yang dilakukan di Sub-Sahara Afrika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bunga, dan investasi asing langsung berpengaruh signifikan terhadap pengukuran tenaga kerja yaitu dapat meningkatkan unemployment (pekerjaan) yang lebih tinggi di Sub-Sahara Afrika.

Persamaan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang variabel-variabel ekonomi yang secara teori dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, dan seperti variabel jumlah angkatan kerja, UMP, PDRB, dan investasi. Perbedaannya adalah di beberapa penelitian ada yang memasukkan variabel pengangguran, inflasi, PAD, produktivitas tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi dan variabel ekonomi lainnya. Dan alat analisis yang digunakan sebagian besar ada yang menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis jalur. Keunggulan dari penelitian ini

adalah dapat mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia. Dan 6 Koridor ini adalah Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali - Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku. Yang mana belum ada penelitian yang menyamai penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Judul | Alat Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|----------------------------------|--|
| 1. | Arifatul Chusna (2013) | Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011 | Analisis Regresi Linesr Berganda | Hasil penelitian menunjukkan laju pertumbuhan sektor industri tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, sedangkan investasi dan upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Jawa Tengah |
| 2. | Arif Budiarto, dan Made Heny Urmila Dewi (2014) | Pengaruh PDRB dan UMP terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Mediasi Investasi di Provinsi Bali | Analisis Jalur | Hasil penelitian menunjukkan PDRB berpengaruh terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja, UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja . Dan Investasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. |
| 3. | Sri Novi Hardiyanti (2014) | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1998-2012 | Analisis Regresi Linesr Berganda | Hasil penelitian menunjukkan Inflasi dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan Investasi berpengaruh negatif dan UMR berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. |

- | | | | | |
|----|---|---|-----------------------------|---|
| 4. | Febryana Rizqi Wasilaputri (2016) | Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014 | Analisis Regresi Data Panel | Hasil penelitian menunjukkan UMP secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan, PDRB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan, dan investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan secara simultan UMP, PDRB, dan Investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. |
| 5. | Tri Kartika Sari (2017) | Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2007-2016 | Analisis Regresi Data Panel | Hasil penelitian menunjukkan UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. IPM berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. sedangkan angkatan kerja dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. |
| 6. | Fadilah Putri Arafah (2018) | Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau | Analisis Regresi Data Panel | Hasil penelitian menunjukkan Angkatan Kerja, PDRB dan Tingkat Pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan UMP berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau. |
| 7. | Rudi Hartono, Arfiah Busari, dan Muhammad | Pengaruh PDRB dan UMK terhadap Penyerapan Tenaga Kerja | Analisis Cobb Douglas | Hasil penelitian menunjukkan variabel PDRB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap |

- Awaluddin
(2018)
- penyerapan tenaga kerja, sedangkan UMP berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda Kalimantan Timur.
8. T. H. Gindling dan Katherine Terrel (2006) The Effect of Multiple Minimum Wages Throughout the Labor Market : The Case of Costa Rica Analisis Regresi Data Panel Hasil penelitian menunjukkan kenaikan upah 10% akan menurunkan tingkat pekerjaan di sektor tertutup sebesar 1,09% dan menurunkan jumlah rata-rata jam kerja yang bekerja di sektor tertutup sebesar 0,6%. Namun tidak berdampak signifikan terhadap jumlah jam kerja di Kosta Rika.
9. Leif Danziger (2009) Noncompliance and the Effect of the Minimum Wage on Hours and Welfare in Competitive Labor Markets Analisis Regresi Linier Berganda Hasil penelitian menunjukkan upah minimum dapat mengurangi jumlah pekerja, mengurangi jam kerja, mengurangi keuntungan yang diharapkan oleh pengusaha , namun dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.
10. David A. Mayom (2015) The Impact of Foreign Direct Investmen on Labor Market Measures : Evidence from Sub-Saharan Africa. Analisis Regresi Data Panel Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bunga, dan investasi asing langsung berpengaruh signifikan terhadap pengukuran tenaga kerja yaitu dapat meningkatkan unemployment yang lebih tinggi di Sub-Sahara Afrika..
-

2.3 Kerangka Konseptual

Pembangunan ekonomi di suatu negara merupakan tahapan yang nantinya dapat merubah pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dalam jangka yang cukup panjang. Dapat diketahui berdasarkan data, penyerapan tenaga kerja di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi.

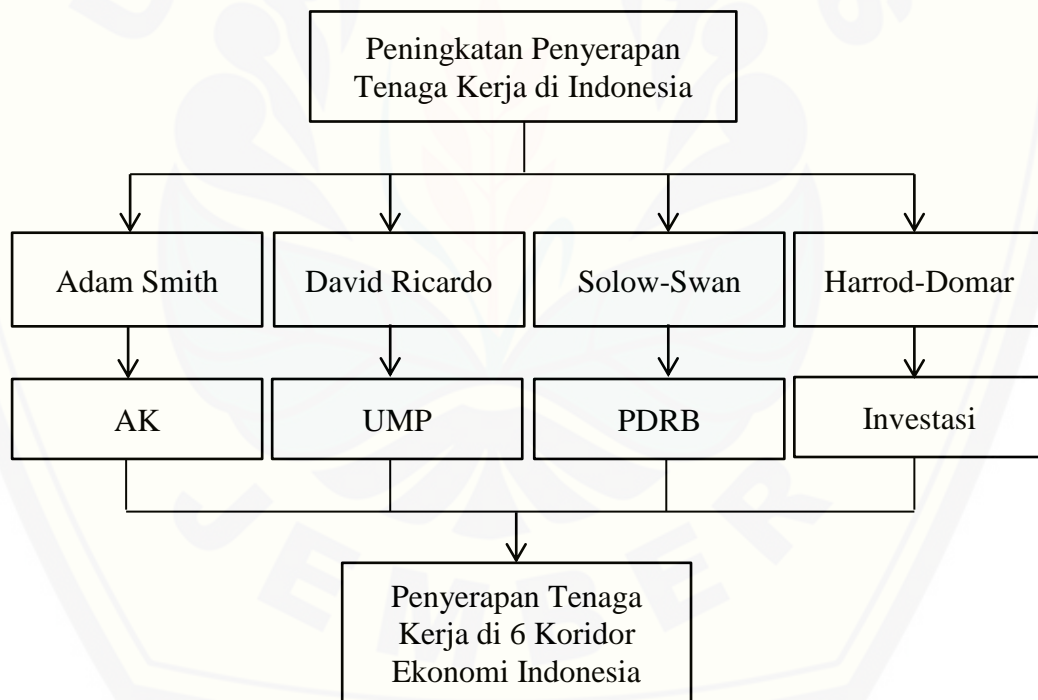
Dalam penyerapan tenaga kerja, menurut Adam Smith jumlah penduduk atau sumberdaya manusia diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama jumlah angkatan kerja yang tersedia. Jumlah angkatan kerja yang besar bermanfaat dalam peningkatan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain jumlah angkatan kerja, dalam penyerapan tenaga kerja variabel upah berpengaruh terhadap besar kecilnya penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, Menurut David Ricardo, jika upah tinggi, para pekerja akan melakukan pernikahan sehingga penawaran tenaga kerja akan meningkat. Ini berlanjut sampai para pencari kerja bersedia diberi upah serendah mungkin ke tingkat alamiah (substansi). Ketika upah berada di tingkat substansi, akan menyebabkan bertambahnya permintaan tenaga kerja. Upah merupakan suatu biaya produksi, kenaikan upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan.

Selain itu, variabel PDRB juga dapat mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja, apabila PDRB meningkat maka ini menunjukkan nilai tambah output atau penjualan seluruh unit ekonomi suatu wilayah akan meningkat, semakin besar output yang dihasilkan suatu perusahaan akan mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja agar produksinya akan meningkat dan dapat mengejar penjualan yang terjadi karena menurut Solow-Swan jumlah output (PDRB) dipengaruhi oleh tenaga kerja.

Selanjutnya, Menurut Harod-Domar investasi sangat penting bagi perekonomian. Variabel investasi secara langsung dapat meningkatkan kapasitas produksi yang mana peningkatan kapasitas produksi tersebut akan meningkatkan permintaan faktor produksi, termasuk tenaga kerja. Perusahaan menggunakan investasi untuk menambah kegunaan faktor produksi. Bertambahnya faktor

produksi akan menambah permintaan tenaga kerja. Namun jika perusahaan menggunakan investasi untuk menambah mesin-mesin sebagai faktor produksi maka penyerapan tenaga kerja akan berkurang.

Berdasarkan tinjauan pustaka serta penjelasan diatas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun berdasarkan pemikiran teoritis dimana variabel ekonomi seperti Jumlah Angkatan Kerja (AK), Upah Minimum Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Investasi akan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Penyerapan Tenaga kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia. Yaitu Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku. Sehingga kerangka konseptual dalam penelitian ini antara lain pada gambar 2.

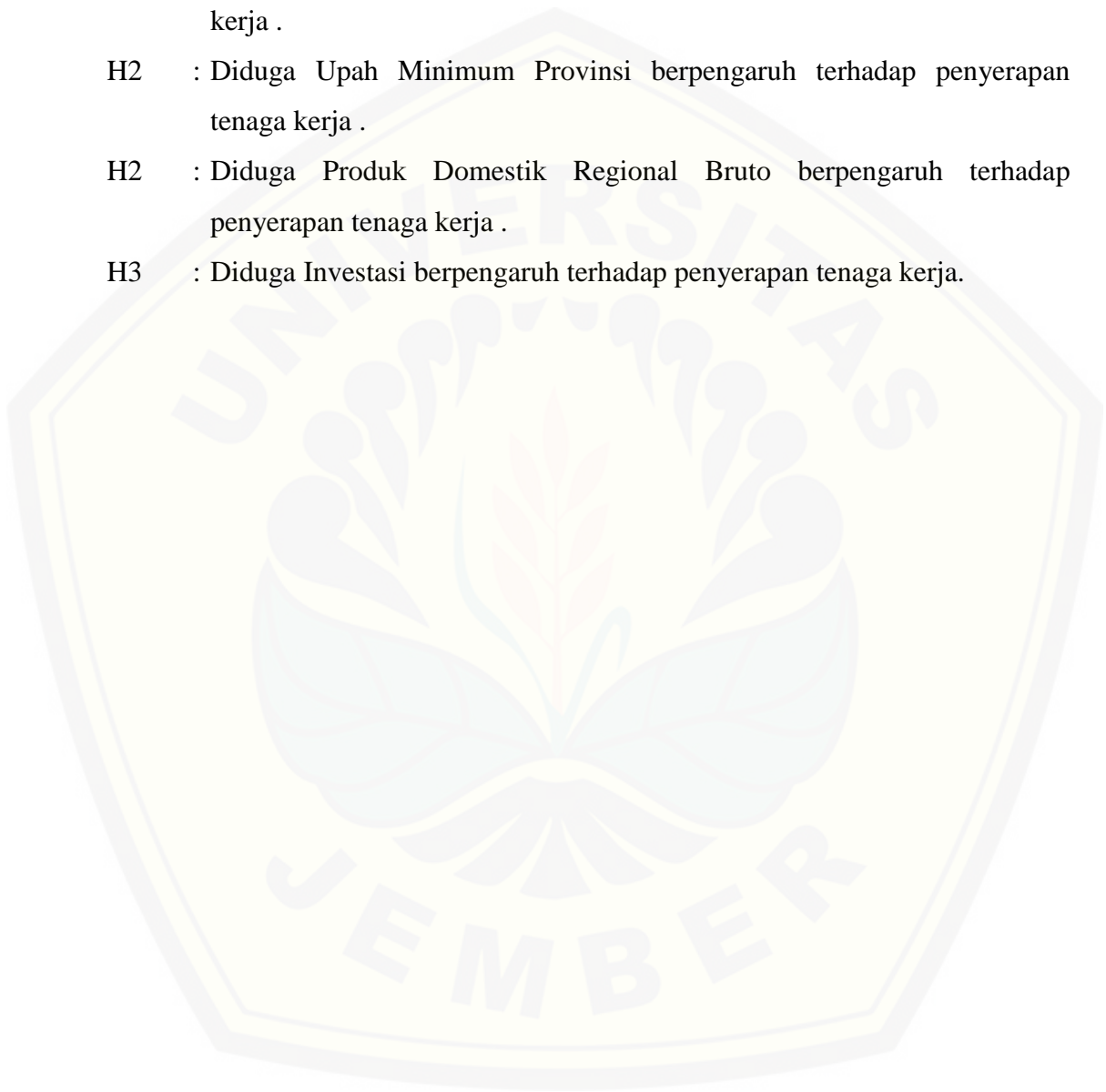


Gambar 2.5 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H1 : Diduga Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja .
- H2 : Diduga Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja .
- H2 : Diduga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja .
- H3 : Diduga Investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen. Penelitian ini menitik beratkan pada teori, mengukur variabel menggunakan angka dan menganalisis sesuai dengan prosedur statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data panel yang terdiri dari data *time series* dan *cross section*. Data *time series* dalam penelitian ini adalah data tahunan selama tahun 2007-2016, sedangkan data *cross section* adalah sebanyak 34 provinsi di Indonesia yang dibagi menjadi 6 Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu 10 provinsi untuk Koridor Ekonomi Sumatera, 6 provinsi untuk Koridor Ekonomi Jawa, 5 provinsi untuk Koridor Ekonomi Kalimantan, 6 provinsi untuk Koridor Ekonomi Sulawesi, 3 provinsi untuk Koridor Ekonomi Bali - Nusa Tenggara, dan 4 provinsi untuk Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang dimana data tersebut diperoleh dari publikasi online BPS.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber yang sifatnya tertulis. Dalam penelitian ini data diperoleh dari publikasi-publikasi yang dikeluarkan oleh BPS seperti publikasi Statistik Indonesia mulai dari tahun 2008-2017, BPS Dalam Angka di masing-masing provinsi, dan juga dari publikasi-publikasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan dokumen-dokumen tersebut nantinya akan didapatkan data mengenai Jumlah Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto, dan Investasi di provinsi-provinsi 6 Koridor Ekonomi Indonesia tahun 2007-2016.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik. Jenis dan sumber data yang digunakan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

| No. | Variabel | Data | Sumber |
|-----|------------------|--------------------------------------|--|
| 1. | Variabel Bebas | Jumlah Angkatan Kerja | Publikasi Online BPS |
| | | Upah Minimum Provinsi | Publikasi Online BPS |
| | | PDRB berdasarkan harga konstan 2010 | Publikasi Online BPS |
| 2. | Variabel Terikat | Investasi Penyerapan Tenaga Kerja | Publikasi Online BPS Publikasi Online BPS |

Sumber: Daftar Pustaka.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah estimasi data panel. Data panel yaitu model ekonometrik yang menyatukan antara deret waktu (*time series*) dengan data kerat lintang (*cross section*), sehingga dalam data panel jumlah observasi merupakan hasil kali observasi deret waktu ($T > 1$) dengan observasi kerat lintang ($N > 1$). Dalam melakukan analisis, data panel dapat dibedakan menjadi dua yaitu balance panel data dan unbalance panel data. Balance panel data terjadi jika panjangnya waktu untuk tiap unit cross section sama. Sedangkan unbalance panel data terjadi jika panjangnya waktu tidak sama untuk setiap unit cross section (Gujarati, 2012). Melalui pengamatan berulang terhadap data cross section, analisis data panel memungkinkan seseorang dalam mempelajari dinamika perubahan dengan data time series. Oleh karena itu, data panel dapat menjelaskan dua macam informasi yaitu informasi cross section pada perbedaan antar subyek dan informasi time series yang merefleksikan perubahan pada subyek waktu.

Kombinasi data *time series* dengan *cross section* dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data dengan pendekatan yang tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan hanya salah satu dari data tersebut. Analisis data panel dapat mempelajari sekelompok subjek jika kita ingin mempertimbangkan naik

dimensi data maupun dimensi waktu. Menurut Baltagi (dalam Gujarati, 2012) keuntungan-keuntungan dari data panel adalah sebagai berikut:

- Teknik estimasi data panel dapat mengatasi heterogenitas.
- Dengan menggabungkan antara data observasi time series dan cross section, data panel lenih banyak memberikan informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinearitas antar variabel dan lebih evisien.
- Data panel paling cocok untuk mempelajari dinamika perubahan.
- Data panel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak dapat dilihat pada cross section murni atau time series murni.
- Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit.
- Data panel dapat meminimumkan bias yang bisa terjadi jika mengagregasi individu-individu ke dalam agregasi besar.

Adapun persamaan umum estimasi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + e_{it}, \quad i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana:

N = Banyak observasi

T = Banyaknya waktu

N x T = Banyaknya data panel

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (Jumlah Angkatan Kerja, UMP, PDRB, dan Investasi) terhadap variabel terikat (Penyerapan Tenaga Kerja) di 6 Koridor Ekonomi Indonesia, peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda panel data dengan persamaan estimasi sebagai berikut:

$$PTK_{it} = \beta_0 + \beta_1 AK_{it} + \beta_2 UMP_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + \beta_4 I_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

PTK = Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa)

t = Tahun yang diteliti 2010-2016

i = Koridor

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi masing-masing variabel

AK = Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)

UMP = Upah Minimum Provinsi (Rupiah)

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)

I = Investasi (Miyar Rupiah)

e = error

Guna mencapai tujuan penelitian, analisa data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui model ekonometrika dengan bantuan program Eviews 9, adapun tahapan-tahap analisis sebagai berikut:

3.4.1 Pemilihan Metode Estimasi Data Panel

a. Metode Estimasi Data Panel

Menurut Basuki (2016), dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

1) *Common Effect Model*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengombinasikan data *time series* dengan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini dapat menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi data panel. Dengan model yang sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X'_{it} \beta_{it} + \varepsilon_{it}$$

Y = Variabel dependen

α = Konstanta

X' = Variabel independen 1

β = Koefisien regresi

ε = Error term

i = Cross section (individu) / koridor

t = Periode waktu / tahun

2) *Fixed Effect Model*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data pada model *Fixed Effect* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar individu. Namun demikian, slope nya sama antar

koridor. Model estimasi ini sering juga disebut dengan *Least Square Dummy Variable (LDSV)*. Dengan model sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \alpha_i + X_{it}' \beta_{it} + \varepsilon_{it}$$

3) *Random Effect Model*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *random effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error term* masing-masing individu. Keuntungan menggunakan model ini yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*. Dengan model sebagai berikut:

$$Y_{it} = X_{it}' \beta_{it} + v_{it}$$

$$\text{Dimana: } v_{it} = c_i + d_t + \varepsilon_{it}$$

c_i = Konstanta yang bergantung pada i

d_t = Konstanta yang bergantung pada t

b. Pemilihan metode

Menurut Basuki (2016), untuk memilih model yang paling tepat dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu:

1) Uji *Chow*

Merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih apakah model yang akan dianalisis menggunakan *common effect* atau *fixed effect*, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H0 : Model *Common Effect*

H1 : Model *Fixed Effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol (H0) adalah apabila nilai probabilitas $F < \alpha$ (0,05).

2) Uji Hausman

Pengujian untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan *random effect* atau *fixed effect* dapat dilakukan dengan *Uji Hausman*, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H₀ : Model *Random Effect*

H₁ : Model *Fixed Effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol (H₀) adalah apabila nilai probabilitas $F < \alpha$ (0,05).

3) Uji Langrange Multiple (LM)

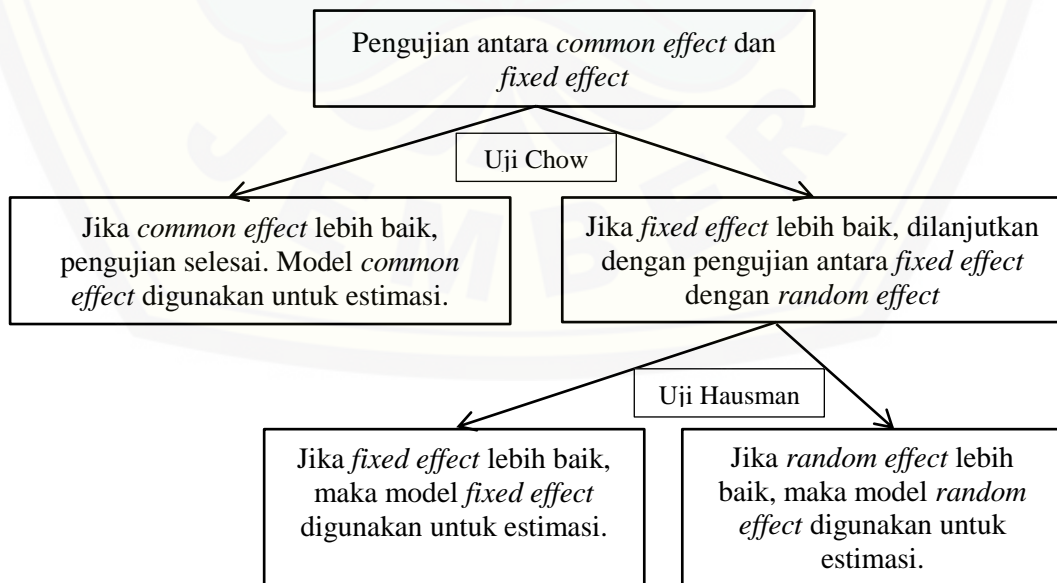
Pengujian untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan *random effect* atau *common effect*. Uji Langrange Multiple didasarkan pada distribusi *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel independen. Pengambilan keputusan jika LM hitung $>$ nilai kritis *Chi-Squares* maka H₀ ditolak dan H_a diterima dengan hipotesis:

H₀ : *Common Effect*

H_a : *Random Effect*

Jika LM statistik lebih besar dari *chi-square* table maka H₀ ditolak sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah *random effect*.

Berikut penjelasan ringkas dari pengujian pemilihan model:



Gambar 3.1 Prosedur Pengujian Pemilihan Model

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel-variabel independen. Jika ada korelasi antara variabel-variabel independennya, maka hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependennya akan terganggu. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari korelasi antar variabel tersebut. Apabila nilai korelasi kurang dari 0,8 maka variabel bebas tersebut tidak memiliki masalah multikolinearitas dan sebaliknya.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai absolut residual. Gujarati (2005) mengemukakan kriteria ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tidak signifikan secara statistik atau nilai signifikannya $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Model memenuhi persyaratan apabila nilai probabilitas *chi-square* nya melebihi nilai alpha 0.05.

c. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan untuk melihat normal tidaknya data yang diteliti. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *Jarque-Berra* (Uji JB) yang dilakukan dengan melihat probabilitas *Jarque-Berra*. Model regresi

terdistribusi normal jika memiliki nilai probabilitas $JB > 0,05$, dan sebaliknya jika nilai probabilitas $JB < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian Autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau secara ruang. Pengujian ini mempunyai arti bahwa hasil suatu tahun tertentu dipengaruhi tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik Durbin-Watson (Gujarati, 1995). Pengujian autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar waktu. Metode pengujiannya sebagai berikut :

- a) Jika $dW < dL$, maka H_0 ditolak sehingga menyatakan terjadi autokorelasi positif.
- b) Jika $dW > 4-dL$, H_0 ditolak sehingga menyatakan terjadi autokorelasi negatif.
- c) Jika $dU < dW < 4-dU$, H_0 diterima sehingga menyatakan tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif
- d) Jika dW terletak diantara dL dan dU atau antara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dengan tabel statistik Durbin-Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel independen.

3.4.3 Pengujian Hipotesis

Penyelesaian regresi dilakukan melalui pengujian variabel-variabel independen yang meliputi uji (t-test) uji individu, uji (F-test) uji bersama-sama, dan uji R^2 uji koefisien determinasi.

a. Uji t-Statistik (Metode Pengujian Parsial)

Dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel tidak bebas. Dengan menganggap variabel bebas (independen) lainnya konstan. Kesimpulan hasil uji t dilakukan dengan melihat hasil output regresi dimana jika probabilitas masing-masing $< 5\%$ berarti signifikan begitu juga sebaliknya jika probabilitas $> 5\%$ berarti tidak signifikan.

Pengujian ini dilakukan dengan rumus dari (Gujarati, 1995) sebagai berikut:

$$t\text{-hitung} = \frac{b_i}{Se_{b_i}}$$

Keterangan :

b_i = Koefisien regresi dari variabel i

Se_{b_i} = Standar error dari b_i

b. Uji F Statistik (Metode Pengujian Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen apabila nilai Probabilitas (F-statistik) < dari alpha 0,05 maka variabel-variabel independen secara keseluruhan atau secara bersama-sama variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut (Gujarati, 1995) :

$$F = \frac{R^2 (k)}{(1-R^2)(n-k-1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi

k = Jumlah Parameter yang Diestimasi Termasuk Konstanta

n = Jumlah Sampel

c. Koefisien Determinasi R^2

Nilai R^2 menunjukkan besarnya variasi variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai R^2 berarti semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sedangkan semakin kecil nilai R^2 berarti semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Informasi yang dapat diperoleh dari koefisien.

3.5 Definisi Operasional Variabel

a. Penyerapan Tenaga Kerja (Y)

Penyerapan tenaga kerja yaitu banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari jumlah angkatan kerja yang sudah Bekerja. Satuan yang digunakan adalah jiwa. Data penyerapan tenaga kerja diperoleh dari Publikasi Online BPS.

b. Jumlah Angkatan Kerja (X1)

Jumlah Angkatan Kerja merupakan jumlah dari angkatan kerja atau penduduk yang memiliki pekerjaan atau sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Satuan yang digunakan adalah jiwa. Data angkatan kerja diperoleh dari Publikasi Online 2017.

c. Upah Minimum Provinsi (X2)

Upah minimum provinsi merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi-provinsi di 6 Koridor Ekonomi Indonesia. Satuan yang digunakan adalah rupiah. Data upah minimum provinsi diperoleh dari data publikasi online BPS 2017.

d. Produk Domestik Regional Bruto (X3)

PDRB merupakan total jumlah nilai tambah atas barang dan jasa di masing-masing provinsi di 6 Koridor Ekonomi Indonesia dalam jangka waktu satu tahun. PDRB dalam penelitian ini menggunakan data PDRB berdasarkan harga konstan 2010. Satuan yang digunakan adalah milyar rupiah. Data PDRB berdasarkan harga konstan diperoleh dari publikasi online BPS 2017.

e. Investasi (X4)

Investasi merupakan total jumlah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri merupakan total penanaman modal dalam negeri yang terealisasi, yang dilakukan oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. Sedangkan penanaman modal asing merupakan total penanaman modal asing yang terealisasi, yang dilakukan oleh negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Satuan yang dijelaskan miliar rupiah. Kurs yang

digunakan untuk mengkonversi penanaman modal asing merupakan kurs dari Bank Indonesia. Data investasi diperoleh dari publikasi BPS Dalam Angka setiap provinsi di 6 Koridor Ekonomi Indonesia tahun 2007-2016.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di semua atau di 6 Koridor Ekonomi Indonesia yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali – Nusa Tenggara dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku menunjukkan bahwa variabel Angkatan Kerja berpengaruh signifikan secara positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Menurut teori Adam Smith, meningkatnya jumlah penduduk terutama angkatan kerja berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya angkatan kerja akan meningkatkan perekonomian karena angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam perekonomian dan digunakan sebagai salah satu faktor produksi dalam perusahaan.
2. Hasil penelitian menunjukkan di Koridor Sumatera, Koridor Bali – Nusa Tenggara dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku menunjukkan variabel UMP berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. ini sesuai teori ketika upah naik maka akan mengurangi penyerapan tenaga kerja, tidak signifikannya upah ini dikarenakan ketika tingkat upah naik maka para pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup dan akan memiliki produktifitas yang lebih tinggi, sehingga dapat menaikkan output. Tingginya produktifitas para karyawan dapat menekan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga tidak terjadi pengurangan penyerapan tenaga kerja. Selain itu dikarenakan sebagian besar penduduk bekerja di Indonesia merupakan pekerja di sektor informal, jadi ketika upah naik para pekerja masih dapat bekerja sebagaimana mestinya. Namun di Koridor Jawa dan Koridor Kalimantan dan di Koridor Sulawesi, variabel UMP berpengaruh secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Berpengaruhnya upah secara positif dikarenakan meningkatnya upah mempengaruhi daya beli masyarakat karena pendapatan mereka lebih besar dan besarnya daya beli ini memberikan

keuntungan besar kepada perusahaan. Sehingga dengan keuntungan tersebut perusahaan dapat menambah perusahaan baru yang memerlukan tambahan pekerja.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Koridor Sumatera, Koridor Kalimantan, dan Koridor Bali – Nusa Tenggara variabel PDRB berpengaruh signifikan secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Ini menunjukkan meningkatnya PDRB akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja guna mengejar peningkatan penjualan, sehingga menyebabkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Sedangkan di Koridor Jawa, Koridor Sulawesi, dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku menunjukkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Tidak signifikannya PDRB ini dikarenakan ketika hasil produksi meningkat, para pengusaha menambah faktor produksi dengan menggunakan mesin dengan tujuan untuk lebih memaksimalkan hasil output perusahaan.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Koridor Sumatera dan Koridor Kalimantan variabel investasi berpengaruh signifikan secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Jadi ketika investasi meningkat maka tenaga kerja yang diminta akan semakin besar. Sedangkan di Koridor Jawa, Koridor Sulawesi, Koridor Bali – Nusa Tenggara, dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku menunjukkan bahwa variabel investasi tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Hal ini dikarenakan Pertama, dikarenakan investasi oleh para pengusaha yang terjadi lebih kepada investasi yang padat modal daripada padat karya. Kedua, dikarenakan faktor struktural, kelembagaan politik sehingga menyebabkan harga tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan harga modal. Ketiga, investasi dari pemerintah hanya berorientasi kepada pembangunan yang kurang menyerap tenaga kerja, seperti investasi untuk belanja fasilitas umum (sarana dan prasarana), keperluan pendidikan, aset-aset finansial, obligasi dan saham. Keempat, investasi yang ada hanya dalam bentuk tanah dan tidak memiliki nilai ekonomi.

5.2 Saran

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jumlah angkatan kerja dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga ketika jumlah angkatan kerja meningkat maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat pula. Sehingga dengan bertambahnya jumlah angkatan setiap tahunnya diharapkan agar pemerintah dapat meningkatkan pendidikan para tenaga kerja dan juga pemerintah perlu meningkatkan skill para angkatan kerja yang ada agar dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan perekonomian, karena jumlah angkatan yang besar dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
2. Mengenai upah minimum provinsi (UMP) hendaknya pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan mengenai upah yang berorientasi kepada kepentingan seluruh pihak. Yang dapat menguntungkan perusahaan maupun tenaga kerjanya. Penentuan upah minimum harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Sehingga dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerintah hendaknya mendorong peningkatan produk domestik regional bruto di setiap sektor perekonomian sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja.
4. Dalam hubungannya dengan investasi, pemerintah hendaknya mendorong investasi-investasi yang padat karya dan lebih mengurangi investasi padat modal, karena investasi padat karya dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan investasi padat modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghofari, F. 2010. Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Arafah, F. P. 2018. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau. *Skripsi*. Yogyakarta : FE Universitas Islam Indonesia.
- Arsyad, L. 1998. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- _____. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Awandari, L. P. P., dan I. G. B. Indrajaya. 2016. Pengaruh Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Kesempatan Kerja. *Jurnal EP Unud*. 5(12) : 1435-1462.
- Badan Pusat Statistik. 2008-2017. Statistik Indonesia 2008-2017. <https://www.bps.go.id/>. [Diakses pada 21 Mei 2018].
- BPS Provinsi Bali. 2016-2017. Provinsi Bali Dalam Angka 2016-2017. <https://bali.bps.go.id/>. [Diakses pada 9 Oktober 2018].
- BPS Provinsi Maluku. 2016-2017. Provinsi Maluku Dalam Angka 2016-2017. <https://maluku.bps.go.id/>. [Diakses pada 9 Oktober 2018].
- BPS Provinsi Maluku Utara. 2016-2017. Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2016-2017. <https://malukuutara.bps.go.id/>. [Diakses pada 9 Oktober 2018].
- BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2016-2017. Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2016-2017. <https://ntb.bps.go.id/>. [Diakses pada 9 Oktober 2018].
- BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2016-2017. Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2016-2017. <https://ntt.bps.go.id/>. [Diakses pada 9 Oktober 2018].
- BPS Provinsi Papua. 2016-2017. Provinsi Papua Dalam Angka 2016-2017. <https://papua.bps.go.id/>. [Diakses pada 9 Oktober 2018].
- BPS Provinsi Papua Barat. 2016-2017. Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2016-2017. <https://papuabarot.bps.go.id/>. [Diakses pada 9 Oktober 2018].
- Basuki, A. T. dan Prawoto, N. 2016. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Depok. PT Rajagrafindo Persada.

- Boediono. 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Boediono. 1991. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE
- Buchari, I. 2016. Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015. *EKSIS*. 11(1): 1907-7513.
- Budiarto, A., M. H. U. Dewi. 2014. Pengaruh PDRB dan UMP terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Mediasi Investasi di Provinsi Bali. *Jurnal EP Unud*. 4(10) : 1219-1246.
- Chusna, A. 2012. Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011. *Jurnal Analisis Pembangunan Ekonomi*. 2 (3).
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1987. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Fauzi, A. 2005. Dari 13 Perusahaan Tambang Baru 6 (Enam) Perusahaan Ajukan Izin Eksplorasi di Kawasan Hutan Lindung. <http://www.menlh.go.id/dari-13-perusahaan-tambang-baru-6-enam-perusahaan-ajukan-ijin-eksplorasi-di-kawasan-hutan-lindung/?fbclid=IwAR1zbVVGu9tV1vep1cxDzOfX3slGVN177k4sasibhTF0ipRSenemNaTVyIw> . [Diakses pada 17 Oktober 2018]
- Feriyanto, Nur. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Ganie, D. 2017. Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. *Jurnal Eksekutif*. 14: 332-354.
- Gujarati, Damodar & Dawn .C. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2: Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, R., A. Busari, dan M. Awaluddin. 2018. Pengaruh PDRB dan UMK terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Inovasi*. 14(1) : 36-43.
- Hardiyanti, S. N. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1998-2012. *Skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Indradewa, I Gusti A. dan Ketut Suardhika N. 2015. Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. 4 (8).

- Iqbal, Muhammad. 2017. Pengamat : Pola Investasi di NTT Perlu Diubah. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/12/21/p1aa2p408-pengamat-pola-investasi-di-ntt-perlu-diubah>. [Diakses pada 19 Oktober 2018].
- Kartika, S. T. 2017. Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2010-2016. *Skripsi*. Yogyakarta: FE Univ. Islam Indonesia.
- Kuncoro, H. 2002. Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 7(1): 45-54.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Marissa, S. 2010. Analisa Pengaruh Upah Minimum Regional, Investasi, dan Jumlah Penduduk terhadap Kesempatan Kerja di Sumatera Barat. *Thesis*. Universitas Andalas.
- Nasir, M. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: LP3S.
- Pangastuti, Y. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Analisis Pembangunan Ekonomi*. 4 (2).
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. *Upah Minimum*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981. *Perlindungan Upah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015. *Pengupahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*. 20 Mei 2011. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian 2011. Jakarta.
- Rachman, F. F. 2016. *Investasi Terbesar RI Masih di Pulau Jawa, Capai Rp 250 Triliun*. <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3330702/investasi-terbesar-ri-masih-di-pulau-jawa-capai-rp-250-triliun>. [Diakses pada 3 April 2018).
- Samsiah, N. 2016. Pengaruh Investasi, Upah Minimum Provinsi, dan Belanja Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Makassar : FEB UIN Alauddin Makassar.

- Sari, T. K. 2017. *Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia 2007-2016. Skripsi*. Yogyakarta : FE Universitas Islam Indonesia.
- Setiawan. 2018. Perbedaan Upah Minimum Sektoral, UMK dan UMP. <https://www.upahminimum.info/perbedaan-upah-minimum-sektoral-umk-dan-ump.html>. [Diakses pada 25 Oktober 2018]
- Sholeh, M. 2007. Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. 4(1): 62-74.
- Sihotang. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Silvia, Z. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Thesis*. Universitas Andalas.
- Simanjuntak, P. J. 1988. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- _____. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Sugiharto, S. D. 2017. Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Skripsi*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. 1996. *Pengantar Teori Makroekonomi : Edisi Kedua*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2006. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2016. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumarsono, S. 2009. *Ekonomi Sumberdaya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susanto, J. 2015. Kurva Permintaan Tenaga Kerja. <http://dinamikapengupahan.blogspot.co.id/2015/10/kurva-permintaan-tenaga-kerja.html?m=1>. [Diakses pada 18 Maret 2018].
- Tarigan, R. 2007. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Todaro, Michael .P. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Enam. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. *Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007. *Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Jakarta.
- Wasilaputri, F. R. 2016. Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wicaksono, R. 2010. Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil, dan Jumlah Unit Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan Sedang dan Besar di Indonesia Tahun 1990-2008. *Skripsi*. FE Undip
- Wihastuti, N. dan Henny, R. 2018. Upah Minimum Provinsi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Gama Societa*. 1 (1).
- Wijaya, A., T. Indrawati, dan E. A. Pailis. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau. *Jom Fekon*. 1 (2).



LAMPIRAN

Lampiran A. Data

A.1. Data Penelitian

A.1.1 Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran di Indonesia pada tahun 2010-2016

| Tahun | Angkatan Kerja | Pengangguran |
|-------|----------------|--------------|
| 2010 | 116.527.546 | 8.319.779 |
| 2011 | 117.370.485 | 7.700.086 |
| 2012 | 118.053.110 | 7.244.956 |
| 2013 | 118.192.778 | 7.388.737 |
| 2014 | 121.872.931 | 7.244.905 |
| 2015 | 122.380.021 | 7.560.822 |
| 2016 | 125.443.748 | 7.031.775 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

A.1.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pulau dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2016

| Pulau | Bekerja | Pengangguran | | | Jumlah Angkatan Kerja |
|------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| | | Pernah Bekerja | Tidak Pernah Bekerja | Jumlah | |
| Sumatera | 25.258.225 | 669.705 | 781.864 | 1.451.569 | 26.709.794 |
| Jawa | 66.820.466 | 2.300.709 | 2.086.404 | 4.387.113 | 71.207.579 |
| Bali | 2.416.555 | 27.245 | 19.239 | 46.484 | 2.463.039 |
| Nusa Tenggara | 4.644.378 | 79.096 | 94.505 | 173.601 | 4.817.979 |
| Kalimantan | 7.355.762 | 225.884 | 203.337 | 429.221 | 7.784.983 |
| Sulawesi | 8.655.477 | 163.002 | 217.221 | 380.223 | 9.035.720 |
| Maluku | 1.194.265 | 15.023 | 58.387 | 73.410 | 1.267.675 |
| Papua | 2.066.845 | 19.501 | 70.633 | 90.134 | 2.156.979 |
| Indonesia | 118.411.973 | 3.500.185 | 3.531.590 | 7.031.755 | 125.443.748 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016.

A.1.3 Jumlah Angkatan Kerja di 6 Koridor Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2016 (Jiwa)

| No. | Koridor | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Koridor Sumatera | 23.988.869 | 24.189.450 | 25.152.495 | 25.587.918 | 26.707.794 |
| 2. | Koridor Jawa | 69.585.170 | 69.646.482 | 71.128.168 | 70.558.487 | 71.207.579 |
| 3. | Koridor Kalimantan | 6.987.319 | 6.886.626 | 7.265.758 | 7.439.528 | 7.785.013 |
| 4. | Koridor Sulawesi | 7.855.874 | 7.730.176 | 8.313.179 | 7.962.017 | 9.035.720 |
| 5. | Koridor Bali-Nusa Tenggara | 6.562.784 | 6.553.694 | 6.786.006 | 6.935.624 | 7.281.018 |
| 6. | Koridor Papua - Kep. Maluku | 3.073.094 | 3.186.350 | 3.227.345 | 3.396.440 | 3.424.664 |

Lampiran A.1.4 Upah Minimum Provinsi di 6 Koridor Ekonomi Indonesia Tahun 2016 (Rupiah)

| No. | Koridor | Provinsi | UMP |
|-----|-----------------------------|----------------------|-----------|
| 1. | Koridor Sumatera | Aceh | 2.118.500 |
| | | Sumatera Utara | 2.118.500 |
| | | Sumatera Barat | 1.800.725 |
| | | Riau | 2.095.000 |
| | | Jambi | 1.906.650 |
| | | Sumatera Selatan | 2.206.000 |
| | | Bengkulu | 1.605.000 |
| | | Lampung | 1.763.000 |
| | | Kep. Bangka Belitung | 2.341.500 |
| | | Kep. Riau | 2.178.710 |
| 2. | Koridor Jawa | DKI Jakarta | 3.100.000 |
| | | Jawa Barat | 2.250.000 |
| | | Jawa Tengah | 1.265.000 |
| | | DI Yogyakarta | 1.237.700 |
| | | Jawa Timur | 1.273.490 |
| | | Banten | 1.784.000 |
| 3. | Koridor Kalimantan | Kalimantan Barat | 1.739.400 |
| | | Kalimantan Tengah | 2.057.558 |
| | | Kalimantan Selatan | 2.085.050 |
| | | Kalimantan Timur | 2.161.253 |
| | | Kalimantan Utara | 2.175.340 |
| 4. | Koridor Sulawesi | Sulawesi Utara | 2.400.000 |
| | | Sulawesi Tengah | 1.670.000 |
| | | Sulawesi Selatan | 2.250.000 |
| | | Sulawesi Tenggara | 1.850.000 |
| | | Gorontalo | 1.875.000 |
| | | Sulawesi Barat | 1.864.000 |
| 5. | Koridor Bali-Nusa Tenggara | Bali | 1.807.600 |
| | | Nusa Tenggara Barat | 1.482.950 |
| | | Nusa Tenggara Timur | 1.425.000 |
| 6. | Koridor Papua - Kep. Maluku | Papua | 2.435.000 |
| | | Papua Barat | 2.237.000 |
| | | Maluku | 1.775.000 |
| | | Maluku Utara | 1.681.266 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

A.2 Data Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Angkatan Kerja, UMP, PDRB, dan Investasi di 6 Koridor Ekonomi

Data yang disajikan merupakan data data penyerapan tenaga kerja (dalam satuan jiwa), jumlah angkatan kerja (dalam satuan jiwa), UMP (dalam satuan rupiah), PDRB (dalam satuan miliar), dan investasi (dalam satuan miliar)

A.2.1 Data Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Angkatan Kerja, UMP, PDRB, dan Investasi di Koridor Sumatera

| Provinsi | Tahun | PTK | AK | UMP | PDRB | I |
|----------------|-------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Aceh | 2007 | 1570761 | 1742185 | 800000 | 110379.8 | 250.7 |
| Aceh | 2008 | 1621998 | 1793410 | 1000000 | 104597.2 | 0.0 |
| Aceh | 2009 | 1732561 | 1897922 | 1200000 | 98833.5 | 85.5 |
| Aceh | 2010 | 1776254 | 1935519 | 1300000 | 101545.2 | 104.1 |
| Aceh | 2011 | 1852473 | 2001259 | 1350000 | 104874.2 | 567.7 |
| Aceh | 2012 | 1796547 | 1978491 | 1400000 | 108914.9 | 2428.8 |
| Aceh | 2013 | 1824586 | 2034107 | 1550000 | 111755.8 | 4906.6 |
| Aceh | 2014 | 1931823 | 2123312 | 1750000 | 113490.4 | 5537.8 |
| Aceh | 2015 | 1966018 | 2182824 | 1900000 | 112661.0 | 4483.8 |
| Aceh | 2016 | 2087045 | 2257943 | 2118500 | 116386.7 | 4305.1 |
| Sumatera Utara | 2007 | 5082797 | 5654131 | 761000 | 278302.3 | 4254.1 |
| Sumatera Utara | 2008 | 5540263 | 6094092 | 822205 | 296095.2 | 2216.6 |
| Sumatera Utara | 2009 | 5765643 | 6298070 | 905000 | 311118.2 | 4073.2 |
| Sumatera Utara | 2010 | 6125571 | 6617377 | 965000 | 331085.2 | 3152.3 |
| Sumatera Utara | 2011 | 5912114 | 6314239 | 1035500 | 353147.6 | 12034.2 |
| Sumatera Utara | 2012 | 5751682 | 6131664 | 1200000 | 375924.1 | 11421.3 |
| Sumatera Utara | 2013 | 5899560 | 6311762 | 1375000 | 398727.1 | 17269.5 |
| Sumatera Utara | 2014 | 5881371 | 6272083 | 1505850 | 419573.3 | 11795.8 |
| Sumatera Utara | 2015 | 5962304 | 6391098 | 1625000 | 440955.9 | 21417.8 |
| Sumatera Utara | 2016 | 5991229 | 6362909 | 2118500 | 465775.5 | 18813.5 |
| Sumatera Barat | 2007 | 1889406 | 2106711 | 725000 | 88941.2 | 845.6 |
| Sumatera Barat | 2008 | 1956378 | 2127512 | 800000 | 95058.3 | 404.8 |
| Sumatera Barat | 2009 | 1998922 | 2172002 | 880000 | 99129.7 | 461.9 |
| Sumatera Barat | 2010 | 2041454 | 2194040 | 940000 | 105017.7 | 182.4 |
| Sumatera Barat | 2011 | 2070725 | 2213513 | 1055000 | 111679.5 | 1341.0 |
| Sumatera Barat | 2012 | 2037642 | 2179826 | 1150000 | 118724.4 | 1916.3 |
| Sumatera Barat | 2013 | 2005625 | 2156385 | 1350000 | 125940.6 | 1934.2 |
| Sumatera Barat | 2014 | 2180336 | 2331993 | 1490000 | 113340.8 | 1962.1 |
| Sumatera Barat | 2015 | 2184599 | 2346163 | 1615000 | 140704.9 | 2337.4 |
| Sumatera Barat | 2016 | 2347911 | 2471814 | 1800725 | 148110.8 | 4885.7 |
| Riau | 2007 | 1907946 | 2115084 | 710000 | 342767.6 | 13525.2 |
| Riau | 2008 | 2055863 | 2239385 | 800000 | 362138.2 | 8606.5 |
| Riau | 2009 | 2067357 | 2260862 | 901600 | 372876.3 | 7028.5 |
| Riau | 2010 | 2170247 | 2377494 | 1016000 | 388578.2 | 2227.6 |
| Riau | 2011 | 2424180 | 2560402 | 1120000 | 410215.8 | 10381.1 |
| Riau | 2012 | 2399002 | 2506776 | 1238000 | 425626.0 | 21299.4 |
| Riau | 2013 | 2481361 | 2625848 | 1400000 | 436187.5 | 22813.0 |
| Riau | 2014 | 2518485 | 2695247 | 1700000 | 447986.8 | 26534.4 |

| | | | | | | |
|------------------|------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Riau | 2015 | 2554296 | 2771349 | 1878000 | 448992.0 | 18925.4 |
| Riau | 2016 | 2765946 | 2987952 | 2095000 | 558998.1 | 18561.4 |
| Jambi | 2007 | 1146861 | 1222951 | 658000 | 74039.4 | 5005.3 |
| Jambi | 2008 | 1224483 | 1290854 | 724000 | 79343.2 | 1820.6 |
| Jambi | 2009 | 1260592 | 1334496 | 800000 | 84411.2 | 797.3 |
| Jambi | 2010 | 1462405 | 1525683 | 900000 | 90618.4 | 734.6 |
| Jambi | 2011 | 1434998 | 1495167 | 1028000 | 97740.9 | 2402.9 |
| Jambi | 2012 | 1423624 | 1470920 | 1142500 | 104615.1 | 3594.3 |
| Jambi | 2013 | 1382471 | 1452832 | 1300000 | 111766.1 | 3271.7 |
| Jambi | 2014 | 1491038 | 1570822 | 1502230 | 119991.4 | 1614.6 |
| Jambi | 2015 | 1550403 | 1620752 | 1710000 | 125036.4 | 5020.7 |
| Jambi | 2016 | 1624522 | 1692193 | 1906650 | 130499.6 | 4722.9 |
| Sumatera Selatan | 2007 | 3057518 | 3372332 | 662000 | 167894.0 | 3891.5 |
| Sumatera Selatan | 2008 | 3191355 | 3472012 | 743000 | 176410.9 | 2030.9 |
| Sumatera Selatan | 2009 | 3196894 | 3460365 | 824730 | 183664.5 | 1398.6 |
| Sumatera Selatan | 2010 | 3421193 | 3665044 | 927825 | 194013.0 | 4299.5 |
| Sumatera Selatan | 2011 | 3553104 | 3770673 | 1048440 | 206360.0 | 8730.2 |
| Sumatera Selatan | 2012 | 3532932 | 3746373 | 1195220 | 220459.2 | 13741.4 |
| Sumatera Selatan | 2013 | 3464620 | 3646996 | 1630000 | 232175.0 | 10075.7 |
| Sumatera Selatan | 2014 | 3692806 | 3885674 | 1825600 | 243297.8 | 21566.1 |
| Sumatera Selatan | 2015 | 3695866 | 3934787 | 1974346 | 254044.9 | 19822.0 |
| Sumatera Selatan | 2016 | 3998637 | 4178794 | 2206000 | 266815.4 | 42936.9 |
| Bengkulu | 2007 | 767107 | 804788 | 644838 | 23925.0 | 0.0 |
| Bengkulu | 2008 | 770642 | 810361 | 690000 | 25300.0 | 187.3 |
| Bengkulu | 2009 | 787308 | 829449 | 735000 | 28352.6 | 15.8 |
| Bengkulu | 2010 | 815741 | 855026 | 780000 | 28362.5 | 353.5 |
| Bengkulu | 2011 | 873719 | 894934 | 815000 | 30295.1 | 592.5 |
| Bengkulu | 2012 | 830266 | 861394 | 930000 | 32363.0 | 470.5 |
| Bengkulu | 2013 | 801146 | 841041 | 1200000 | 34326.4 | 416.1 |
| Bengkulu | 2014 | 868794 | 900054 | 1350000 | 36207.1 | 273.1 |
| Bengkulu | 2015 | 904317 | 951007 | 1500000 | 38066.0 | 837.0 |
| Bengkulu | 2016 | 964971 | 997913 | 1605000 | 40082.9 | 1714.8 |
| Lampung | 2007 | 3281351 | 3550483 | 555000 | 128225.7 | 1957.3 |
| Lampung | 2008 | 3313553 | 3568770 | 617000 | 135082.1 | 1700.4 |
| Lampung | 2009 | 3387175 | 3627155 | 691000 | 142193.1 | 1020.9 |
| Lampung | 2010 | 3737078 | 3957697 | 767500 | 150560.8 | 694.3 |
| Lampung | 2011 | 3482301 | 3696066 | 855000 | 160437.5 | 1917.3 |
| Lampung | 2012 | 3449307 | 3637897 | 975000 | 170769.2 | 1875.5 |
| Lampung | 2013 | 3385046 | 3595510 | 1150000 | 180620.0 | 1968.8 |
| Lampung | 2014 | 3673158 | 3857936 | 1399037 | 189797.5 | 5647.1 |
| Lampung | 2015 | 3635258 | 3832108 | 1581000 | 199536.2 | 4644.9 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------|---------|---------|---------|----------|--------|
| Lampung | 2016 | 3931321 | 4121668 | 1763000 | 209807.2 | 7209.9 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 2007 | 475006 | 507962 | 720000 | 30921.3 | 313.7 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 2008 | 492949 | 524370 | 813000 | 32343.8 | 26.5 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 2009 | 506284 | 539410 | 850000 | 33553.2 | 572.0 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 2010 | 585136 | 620063 | 910000 | 35361.9 | 302.8 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 2011 | 589634 | 611698 | 1024000 | 38014.0 | 2521.4 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 2012 | 583102 | 604163 | 1110000 | 40104.9 | 1347.3 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 2013 | 596786 | 619700 | 1265000 | 42190.9 | 2153.3 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 2014 | 604223 | 636959 | 1640000 | 44159.4 | 2058.9 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 2015 | 623949 | 665842 | 2100000 | 45961.5 | 2160.5 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 2016 | 686830 | 705173 | 2341500 | 47852.7 | 2926.4 |
| Kepulauan Riau | 2007 | 535797 | 588874 | 805000 | 93996.8 | 857.7 |
| Kepulauan Riau | 2008 | 612667 | 666000 | 833000 | 100227.1 | 2399.5 |
| Kepulauan Riau | 2009 | 626456 | 681769 | 892000 | 103758.3 | 3563.4 |
| Kepulauan Riau | 2010 | 769486 | 826535 | 925000 | 111223.7 | 2444.8 |
| Kepulauan Riau | 2011 | 781824 | 847997 | 975000 | 118961.4 | 4390.6 |
| Kepulauan Riau | 2012 | 824567 | 871365 | 1015000 | 128035.0 | 7427.1 |
| Kepulauan Riau | 2013 | 848660 | 905269 | 1365087 | 137263.9 | 4757.6 |
| Kepulauan Riau | 2014 | 819656 | 878415 | 1665000 | 146325.2 | 5418.7 |
| Kepulauan Riau | 2015 | 836670 | 891988 | 1954000 | 155112.9 | 9415.8 |
| Kepulauan Riau | 2016 | 859813 | 931435 | 2178710 | 162922.5 | 7628.6 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

A.2.2 Data Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Angkatan Kerja, UMP, PDRB, dan Investasi di Koridor Jawa

| Provinsi | Tahun | PTK | AK | UMP | PDRB | I |
|-------------|-------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| DKI Jakarta | 2007 | 3842944 | 4395324 | 900560 | 162922.5 | 71593.4 |
| DKI Jakarta | 2008 | 4191966 | 4772477 | 972604 | 961314.4 | 144854.2 |
| DKI Jakarta | 2009 | 4118390 | 4687727 | 1069865 | 1009543 | 89082.4 |
| DKI Jakarta | 2010 | 4689760 | 5272604 | 1118000 | 1075103.1 | 63016.4 |
| DKI Jakarta | 2011 | 4588418 | 5143826 | 1290000 | 1147558.2 | 51591.8 |
| DKI Jakarta | 2012 | 4838596 | 5368572 | 1529000 | 1222527.9 | 47086.9 |
| DKI Jakarta | 2013 | 4712836 | 5180014 | 2200000 | 1269694.6 | 32854.0 |
| DKI Jakarta | 2014 | 4634369 | 5063479 | 2441300 | 1374348.6 | 79815.8 |
| DKI Jakarta | 2015 | 4724029 | 5092219 | 2700000 | 1454345.8 | 65279.4 |
| DKI Jakarta | 2016 | 4861832 | 5178839 | 3100000 | 1539376.7 | 58942.1 |
| Jawa Barat | 2007 | 15853822 | 18240036 | 516840 | 771499.1 | 30463.2 |
| Jawa Barat | 2008 | 16480395 | 18743979 | 568193 | 819406.2 | 41056.5 |
| Jawa Barat | 2009 | 16901430 | 18981620 | 628191 | 853733.4 | 32591.8 |
| Jawa Barat | 2010 | 16942444 | 18893835 | 671500 | 906685.8 | 46602.6 |
| Jawa Barat | 2011 | 17454781 | 19356624 | 732000 | 965622.1 | 48751.2 |
| Jawa Barat | 2012 | 18321108 | 20150094 | 780000 | 1028409.7 | 52959.2 |

| | | | | | | |
|---------------|------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| Jawa Barat | 2013 | 18413964 | 20284633 | 850000 | 1093543.6 | 93518.9 |
| Jawa Barat | 2014 | 19230943 | 21006139 | 1000000 | 1149216.1 | 108954.4 |
| Jawa Barat | 2015 | 18791482 | 20586356 | 1000000 | 1207083.4 | 105180.0 |
| Jawa Barat | 2016 | 19202038 | 21075899 | 2250000 | 1275546.5 | 105585.1 |
| Jawa Tengah | 2007 | 16304058 | 17664277 | 500000 | 530294.9 | 1727.1 |
| Jawa Tengah | 2008 | 15463658 | 16690966 | 547000 | 560038.3 | 3289.8 |
| Jawa Tengah | 2009 | 15835382 | 17087649 | 575000 | 588830.9 | 3839.7 |
| Jawa Tengah | 2010 | 15809447 | 16856330 | 660000 | 623224.6 | 1608.6 |
| Jawa Tengah | 2011 | 15822765 | 16918797 | 675000 | 656268.1 | 5144.0 |
| Jawa Tengah | 2012 | 16531395 | 17095031 | 765000 | 691343.1 | 9117.7 |
| Jawa Tengah | 2013 | 16469960 | 16986776 | 830000 | 726655.1 | 18977.7 |
| Jawa Tengah | 2014 | 16550682 | 17547046 | 910000 | 764959.2 | 19973.4 |
| Jawa Tengah | 2015 | 16435142 | 17298925 | 910000 | 806775.4 | 27103.7 |
| Jawa Tengah | 2016 | 16511136 | 17312466 | 1265000 | 849383.6 | 38924.5 |
| DI Yogyakarta | 2007 | 1774245 | 1889445 | 500000 | 56219.1 | 44.6 |
| DI Yogyakarta | 2008 | 1892205 | 1999734 | 586000 | 59049.7 | 240.6 |
| DI Yogyakarta | 2009 | 1895648 | 2016694 | 700000 | 61667.6 | 149.6 |
| DI Yogyakarta | 2010 | 1775148 | 1882296 | 745700 | 64679.0 | 4595.4 |
| DI Yogyakarta | 2011 | 1850436 | 1872912 | 808000 | 68049.9 | 6183.5 |
| DI Yogyakarta | 2012 | 1867708 | 1944858 | 892700 | 71702.5 | 7237.4 |
| DI Yogyakarta | 2013 | 1847070 | 1910959 | 947100 | 75627.5 | 8067.8 |
| DI Yogyakarta | 2014 | 1956043 | 2023461 | 988500 | 79536.1 | 9524.4 |
| DI Yogyakarta | 2015 | 1294251 | 1971463 | 988500 | 83474.4 | 11233.4 |
| DI Yogyakarta | 2016 | 1410777 | 2099436 | 1237700 | 87687.9 | 12007.7 |
| Jawa Timur | 2007 | 18751421 | 20117924 | 448500 | 834716.5 | 26065.1 |
| Jawa Timur | 2008 | 18882277 | 20178590 | 500000 | 884307.8 | 9363.2 |
| Jawa Timur | 2009 | 19305056 | 20338568 | 570000 | 928655.0 | 10371.5 |
| Jawa Timur | 2010 | 18698108 | 19527051 | 630000 | 990648.8 | 59671.6 |
| Jawa Timur | 2011 | 18940340 | 19761886 | 705000 | 1054401.8 | 69814.5 |
| Jawa Timur | 2012 | 19081995 | 19901558 | 745000 | 1124464.6 | 78011.2 |
| Jawa Timur | 2013 | 19266457 | 20137795 | 866200 | 1192789.8 | 122600.1 |
| Jawa Timur | 2014 | 19306508 | 20149998 | 1000000 | 1262684.5 | 120202.7 |
| Jawa Timur | 2015 | 19367777 | 20274681 | 1000000 | 1331395.0 | 138809.1 |
| Jawa Timur | 2016 | 19114563 | 19953846 | 1273490 | 1405236.1 | 155020.4 |
| Banten | 2007 | 3383661 | 4016423 | 746500 | 230991.5 | 11276.7 |
| Banten | 2008 | 3668895 | 4325455 | 837000 | 244330.1 | 8870.8 |
| Banten | 2009 | 3704778 | 4357240 | 917500 | 255835.5 | 24723.0 |
| Banten | 2010 | 4583085 | 5309462 | 955300 | 271465.3 | 27085.3 |
| Banten | 2011 | 4529660 | 5210224 | 1000000 | 290545.8 | 34159.5 |
| Banten | 2012 | 4605847 | 5125057 | 1042000 | 310385.6 | 42466.6 |
| Banten | 2013 | 4637019 | 5146305 | 1170000 | 331009.1 | 42922.3 |

| | | | | | | |
|--------|------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Banten | 2014 | 4853992 | 5338045 | 1325000 | 349351.2 | 36057.1 |
| Banten | 2015 | 4825460 | 5334843 | 1600000 | 368377.2 | 45662.4 |
| Banten | 2016 | 5088497 | 5587093 | 1784000 | 387824.4 | 52468.7 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

A.2.3 Data Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Angkatan Kerja, UMP, PDRB, dan Investasi di Koridor Kalimantan

| Provinsi | Tahun | PTK | AK | UMP | PDRB | I |
|--------------------|-------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Kalimantan Barat | 2007 | 2005027 | 2143823 | 560000 | 73838 | 448.3 |
| Kalimantan Barat | 2008 | 2040767 | 2157549 | 645000 | 77864.9 | 821.5 |
| Kalimantan Barat | 2009 | 2081211 | 2200895 | 705000 | 81605.4 | 917.6 |
| Kalimantan Barat | 2010 | 2095795 | 2197325 | 741000 | 86065.9 | 3513.6 |
| Kalimantan Barat | 2011 | 2146572 | 2233195 | 802500 | 90797.6 | 8285.8 |
| Kalimantan Barat | 2012 | 2106514 | 2182524 | 900000 | 96161.9 | 8275.5 |
| Kalimantan Barat | 2013 | 2083253 | 2140166 | 1060000 | 101980.3 | 11457.7 |
| Kalimantan Barat | 2014 | 2226510 | 2320229 | 1380000 | 107115.0 | 17601.9 |
| Kalimantan Barat | 2015 | 2235887 | 2357224 | 1560000 | 112324.9 | 24505.6 |
| Kalimantan Barat | 2016 | 2287823 | 2388758 | 1739400 | 118184.6 | 17685.8 |
| Kalimantan Tengah | 2007 | 966010 | 1018025 | 665973 | 47359 | 1564.9 |
| Kalimantan Tengah | 2008 | 982198 | 1029445 | 765868 | 50280.8 | 1585.2 |
| Kalimantan Tengah | 2009 | 998967 | 1047402 | 873089 | 53080.4 | 1534.8 |
| Kalimantan Tengah | 2010 | 1022580 | 1066733 | 986590 | 56531.0 | 11021.9 |
| Kalimantan Tengah | 2011 | 1105701 | 1134587 | 1134580 | 60492.9 | 10848.9 |
| Kalimantan Tengah | 2012 | 1070210 | 1105263 | 1327459 | 64649.2 | 11742.7 |
| Kalimantan Tengah | 2013 | 1063711 | 1097627 | 1553127 | 69411.0 | 8455.9 |
| Kalimantan Tengah | 2014 | 1154489 | 1193171 | 1723970 | 73724.5 | 14054.0 |
| Kalimantan Tengah | 2015 | 1214681 | 1272461 | 1896367 | 78891.0 | 14104.5 |
| Kalimantan Tengah | 2016 | 1248189 | 1311427 | 2057558 | 83909.5 | 13790.7 |
| Kalimantan Selatan | 2007 | 1598981 | 1730916 | 745000 | 72087 | 1245.5 |
| Kalimantan Selatan | 2008 | 1670139 | 1780220 | 825000 | 76733.4 | 595.6 |
| Kalimantan Selatan | 2009 | 1705905 | 1821717 | 930000 | 80789.4 | 3345.8 |
| Kalimantan Selatan | 2010 | 1743622 | 1840296 | 1024500 | 85305.0 | 4794.6 |
| Kalimantan Selatan | 2011 | 1824929 | 1925684 | 1126000 | 91252.1 | 5858.9 |
| Kalimantan Selatan | 2012 | 1821327 | 1922151 | 1225000 | 202184.6 | 7253.1 |
| Kalimantan Selatan | 2013 | 1811096 | 1882503 | 1337500 | 217589.1 | 11881.7 |
| Kalimantan Selatan | 2014 | 1867462 | 1941229 | 1620000 | 233988.1 | 9524.4 |
| Kalimantan Selatan | 2015 | 1889502 | 1987250 | 1870000 | 250758.3 | 15274.2 |
| Kalimantan Selatan | 2016 | 1965088 | 2078384 | 2085050 | 269338.5 | 9591.5 |
| Kalimantan Timur | 2007 | 1091625 | 1241421 | 766500 | 370843.1 | 2629.7 |
| Kalimantan Timur | 2008 | 1259587 | 1416963 | 889654 | 389012.8 | 480.2 |
| Kalimantan Timur | 2009 | 1302772 | 1460996 | 955000 | 397900.9 | 1233.2 |

| | | | | | | |
|------------------|------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Kalimantan Timur | 2010 | 1481898 | 1648455 | 1002000 | 418211.6 | 22896.0 |
| Kalimantan Timur | 2011 | 1591003 | 1764696 | 1084000 | 445264.4 | 14851.8 |
| Kalimantan Timur | 2012 | 1619118 | 1777381 | 1177000 | 469646.3 | 33577.5 |
| Kalimantan Timur | 2013 | 1624272 | 1766330 | 1752073 | 438532.9 | 35046.0 |
| Kalimantan Timur | 2014 | 1677466 | 1811129 | 1886315 | 446029.0 | 42356.4 |
| Kalimantan Timur | 2015 | 1423957 | 1539491 | 2026126 | 440647.7 | 42348.9 |
| Kalimantan Timur | 2016 | 1581239 | 1717892 | 2161253 | 438977.0 | 22551.4 |
| Kalimantan Utara | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Kalimantan Utara | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Kalimantan Utara | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Kalimantan Utara | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Kalimantan Utara | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Kalimantan Utara | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Kalimantan Utara | 2013 | 0 | 0 | 0 | 44091.7 | 0.0 |
| Kalimantan Utara | 2014 | 0 | 0 | 0 | 47696.4 | 2131.6 |
| Kalimantan Utara | 2015 | 267023 | 283102 | 2026126 | 49316.0 | 4096.0 |
| Kalimantan Utara | 2016 | 273423 | 288552 | 2175340 | 51165.0 | 5556.2 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

A.2.4 Data Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Angkatan Kerja, UMP, PDRB, dan Investasi di Koridor Sulawesi

| Provinsi | Tahun | PTK | AK | UMP | PDRB | I |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Sulawesi Utara | 2007 | 908503 | 1036499 | 750000 | 40371.9 | 764.1 |
| Sulawesi Utara | 2008 | 912198 | 1020952 | 825000 | 44756.2 | 553.6 |
| Sulawesi Utara | 2009 | 940173 | 1051130 | 929500 | 48267.4 | 880.7 |
| Sulawesi Utara | 2010 | 936939 | 1036574 | 1000000 | 51721.3 | 3,226.5 |
| Sulawesi Utara | 2011 | 990720 | 1084203 | 1050000 | 54910.9 | 3,371.2 |
| Sulawesi Utara | 2012 | 967292 | 1038128 | 1250000 | 58677.6 | 1,323.1 |
| Sulawesi Utara | 2013 | 946852 | 1014600 | 1550000 | 62422.5 | 973.7 |
| Sulawesi Utara | 2014 | 980756 | 1060752 | 1900000 | 66360.8 | 1,441.3 |
| Sulawesi Utara | 2015 | 1000032 | 1099272 | 2150000 | 70425.1 | 1,485.3 |
| Sulawesi Utara | 2016 | 1110564 | 1183721 | 2400000 | 74771.1 | 10,353.7 |
| Sulawesi Tengah | 2007 | 1083944 | 1183163 | 615000 | 40995.9 | 589.9 |
| Sulawesi Tengah | 2008 | 1131706 | 1196988 | 670000 | 44185.7 | 21.6 |
| Sulawesi Tengah | 2009 | 1149718 | 1215727 | 720000 | 47592.4 | 47.5 |
| Sulawesi Tengah | 2010 | 1164226 | 1220454 | 777500 | 51752.1 | 2,065.4 |
| Sulawesi Tengah | 2011 | 1260999 | 1313680 | 827500 | 56833.8 | 7,730.4 |
| Sulawesi Tengah | 2012 | 1165442 | 1213063 | 885000 | 62249.5 | 11,735.7 |
| Sulawesi Tengah | 2013 | 1175930 | 1228337 | 995000 | 68219.3 | 12,407.7 |
| Sulawesi Tengah | 2014 | 1293226 | 1342615 | 1250000 | 71677.5 | 20,721.7 |
| Sulawesi Tengah | 2015 | 1327418 | 1384235 | 1500000 | 82803.2 | 15,948.4 |
| Sulawesi Tengah | 2016 | 1459803 | 1509505 | 1670000 | 91070.6 | 23,171.7 |

| | | | | | | |
|-------------------|------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Sulawesi Selatan | 2007 | 2939463 | 3312177 | 673200 | 238642.1 | 905.8 |
| Sulawesi Selatan | 2008 | 3136111 | 3447879 | 740520 | 149434.3 | 1,507.1 |
| Sulawesi Selatan | 2009 | 3222256 | 3536920 | 905000 | 158746.7 | 2,247.1 |
| Sulawesi Selatan | 2010 | 3272365 | 3571317 | 1000000 | 171740.7 | 64,198.3 |
| Sulawesi Selatan | 2011 | 3375498 | 3612424 | 1100000 | 185708.5 | 5,132.9 |
| Sulawesi Selatan | 2012 | 3351908 | 3560891 | 1200000 | 202184.6 | 10,361.1 |
| Sulawesi Selatan | 2013 | 3291280 | 3468192 | 1440000 | 217589.1 | 7,309.4 |
| Sulawesi Selatan | 2014 | 3527936 | 3715801 | 1800000 | 233988.1 | 8,827.1 |
| Sulawesi Selatan | 2015 | 3485492 | 3706128 | 2000000 | 250758.3 | 12,435.7 |
| Sulawesi Selatan | 2016 | 3694712 | 3881003 | 2250000 | 269338.5 | 8,476.5 |
| Sulawesi Tenggara | 2007 | 894601 | 955763 | 640000 | 38756.6 | 2,768.9 |
| Sulawesi Tenggara | 2008 | 923118 | 979256 | 700000 | 41576.1 | 7.2 |
| Sulawesi Tenggara | 2009 | 950876 | 998195 | 770000 | 44724.2 | 51.9 |
| Sulawesi Tenggara | 2010 | 997678 | 1045899 | 860000 | 48401.2 | 212.4 |
| Sulawesi Tenggara | 2011 | 954981 | 1058999 | 930000 | 53546.7 | 293.7 |
| Sulawesi Tenggara | 2012 | 975879 | 1016957 | 1032300 | 59785.4 | 1,400.1 |
| Sulawesi Tenggara | 2013 | 968949 | 1014192 | 1125207 | 64268.7 | 2,454.2 |
| Sulawesi Tenggara | 2014 | 1037419 | 1085509 | 1400000 | 68291.8 | 3,483.3 |
| Sulawesi Tenggara | 2015 | 1074916 | 1138045 | 1652000 | 72991.3 | 4,016.9 |
| Sulawesi Tenggara | 2016 | 1219548 | 1253624 | 1850000 | 77739.5 | 6,985.8 |
| Gorontalo | 2007 | 362676 | 390649 | 560000 | 12408.8 | 0.0 |
| Gorontalo | 2008 | 405126 | 429384 | 600000 | 13370.8 | 0.0 |
| Gorontalo | 2009 | 420962 | 447313 | 675000 | 14379 | 0.0 |
| Gorontalo | 2010 | 432926 | 456499 | 710000 | 15475.7 | 27.7 |
| Gorontalo | 2011 | 445210 | 465027 | 762500 | 16669.1 | 184.3 |
| Gorontalo | 2012 | 445729 | 466073 | 837500 | 17987.1 | 652.1 |
| Gorontalo | 2013 | 449104 | 468380 | 1175000 | 19367.6 | 439.1 |
| Gorontalo | 2014 | 479137 | 500056 | 1325000 | 20775.8 | 101.7 |
| Gorontalo | 2015 | 493687 | 517788 | 1600000 | 22068.6 | 189.5 |
| Gorontalo | 2016 | 546668 | 562196 | 1875000 | 23507.2 | 2,377.8 |
| Sulawesi Barat | 2007 | 444863 | 470497 | 691464 | 12924.4 | 0.0 |
| Sulawesi Barat | 2008 | 473309 | 495959 | 760500 | 14484.5 | 0.0 |
| Sulawesi Barat | 2009 | 488080 | 511144 | 909400 | 15357.4 | 0.0 |
| Sulawesi Barat | 2010 | 514867 | 532171 | 944200 | 17183.8 | 1,354.8 |
| Sulawesi Barat | 2011 | 536048 | 551631 | 1006000 | 19027.5 | 297.3 |
| Sulawesi Barat | 2012 | 548783 | 560762 | 1127000 | 20786.9 | 231.3 |
| Sulawesi Barat | 2013 | 523960 | 536475 | 1165000 | 22227.4 | 719.6 |
| Sulawesi Barat | 2014 | 595797 | 608446 | 1400000 | 24195.7 | 915.1 |
| Sulawesi Barat | 2015 | 595905 | 116549 | 1655500 | 25983.6 | 1,131.4 |
| Sulawesi Barat | 2016 | 624182 | 645671 | 1864000 | 27550.3 | 368.4 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

A.2.5 Data Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Angkatan Kerja, UMP, PDRB, dan Investasi di Koridor Bali – Nusa Tenggara

| Provinsi | Tahun | PTK | AK | UMP | PDRB | I |
|---------------------|-------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Bali | 2007 | 1982134 | 2059711 | 622000 | 79361.6 | 741.7 |
| Bali | 2008 | 2029730 | 2099278 | 682650 | 84102.0 | 1195.9 |
| Bali | 2009 | 2057118 | 2123588 | 760000 | 88583.4 | 3323.8 |
| Bali | 2010 | 2177358 | 2246149 | 829316 | 93749.3 | 4155.0 |
| Bali | 2011 | 2204874 | 2257258 | 890000 | 99991.6 | 6968.4 |
| Bali | 2012 | 2268708 | 2316033 | 967500 | 106951.5 | 9761.5 |
| Bali | 2013 | 2273897 | 2315379 | 1181000 | 114103.6 | 8380.6 |
| Bali | 2014 | 2272362 | 2316758 | 1542600 | 121787.6 | 6148.4 |
| Bali | 2015 | 2324805 | 2372015 | 1621172 | 129130.6 | 8094.4 |
| Bali | 2016 | 2416555 | 2463039 | 1807600 | 137192.5 | 6702.3 |
| Nusa Tenggara Barat | 2007 | 1951182 | 2086446 | 645000 | 57185 | 84.9 |
| Nusa Tenggara Barat | 2008 | 1904781 | 2029081 | 730000 | 58800.3 | 207.4 |
| Nusa Tenggara Barat | 2009 | 1967380 | 2098638 | 832500 | 65936.7 | 41.8 |
| Nusa Tenggara Barat | 2010 | 2132933 | 2252076 | 890775 | 70122.7 | 4849.5 |
| Nusa Tenggara Barat | 2011 | 1962240 | 2072782 | 950000 | 67379.1 | 6462.6 |
| Nusa Tenggara Barat | 2012 | 1978764 | 2088712 | 1000000 | 66340.8 | 8821.9 |
| Nusa Tenggara Barat | 2013 | 1981842 | 2094550 | 1100000 | 69766.7 | 8137.1 |
| Nusa Tenggara Barat | 2014 | 2094100 | 2221810 | 1210000 | 73373.0 | 7819.8 |
| Nusa Tenggara Barat | 2015 | 2127503 | 2255872 | 1330000 | 89344.6 | 10002.3 |
| Nusa Tenggara Barat | 2016 | 2367310 | 2464331 | 1482950 | 94548.2 | 7402.7 |
| Nusa Tenggara Timur | 2007 | 2009643 | 2087368 | 600000 | 38099.9 | 5.7 |
| Nusa Tenggara Timur | 2008 | 2086105 | 2166919 | 650000 | 39942.9 | 20.2 |
| Nusa Tenggara Timur | 2009 | 2160733 | 2250128 | 725000 | 41658.2 | 57.6 |
| Nusa Tenggara Timur | 2010 | 2061229 | 2132381 | 800000 | 43846.6 | 52.5 |
| Nusa Tenggara Timur | 2011 | 2096259 | 2154258 | 850000 | 46334.1 | 76.9 |
| Nusa Tenggara Timur | 2012 | 2095683 | 2158039 | 925000 | 48863.2 | 134.4 |
| Nusa Tenggara Timur | 2013 | 2075948 | 2143765 | 1010000 | 51505.2 | 154.2 |
| Nusa Tenggara Timur | 2014 | 2174228 | 2247438 | 1150000 | 54108.0 | 212.0 |
| Nusa Tenggara Timur | 2015 | 2219291 | 2307737 | 1250000 | 56831.9 | 2260.5 |
| Nusa Tenggara Timur | 2016 | 2277068 | 2353648 | 1425000 | 59775.7 | 1625.5 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

A.2.6 Data Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Angkatan Kerja, UMP, PDRB, dan Investasi di Koridor Papua – Kepulauan Maluku

| Provinsi | Tahun | PTK | AK | UMP | PDRB | I |
|----------|-------|---------|---------|---------|----------|--------|
| Papua | 2007 | 941100 | 990774 | 987000 | 94979.5 | 5.7 |
| Papua | 2008 | 1028023 | 1075214 | 1105500 | 93651.5 | 256.4 |
| Papua | 2009 | 1082028 | 1128036 | 1216100 | 114460.7 | 25.9 |
| Papua | 2010 | 1456545 | 1510176 | 1316500 | 110808.2 | 4727.7 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Papua | 2011 | 1476227 | 1536728 | 1403000 | 106066.7 | 19492.4 |
| Papua | 2012 | 1527933 | 1585434 | 1585000 | 107890.9 | 16652.6 |
| Papua | 2013 | 1634332 | 1688876 | 1710000 | 117118.8 | 33161.7 |
| Papua | 2014 | 1617437 | 1675113 | 2040000 | 121391.2 | 17651.2 |
| Papua | 2015 | 1672480 | 1741945 | 2193000 | 130459.9 | 3633.1 |
| Papua | 2016 | 1664485 | 1722172 | 2435000 | 142476.4 | 16139.1 |
| Papua Barat | 2007 | 268117 | 296146 | 987000 | 26219.8 | 28.8 |
| Papua Barat | 2008 | 316193 | 342382 | 1105500 | 28275.3 | 307.6 |
| Papua Barat | 2009 | 325759 | 352385 | 1180000 | 32196.3 | 55.4 |
| Papua Barat | 2010 | 316547 | 342288 | 1210000 | 41361.7 | 288.7 |
| Papua Barat | 2011 | 336588 | 369619 | 1410000 | 42867.2 | 502.7 |
| Papua Barat | 2012 | 341741 | 361597 | 1450000 | 44423.3 | 487.5 |
| Papua Barat | 2013 | 353619 | 370750 | 1720000 | 47694.2 | 1052.1 |
| Papua Barat | 2014 | 378436 | 398424 | 1870000 | 50259.9 | 2217.5 |
| Papua Barat | 2015 | 380226 | 413635 | 2015000 | 52346.5 | 13657.3 |
| Papua Barat | 2016 | 402360 | 434817 | 2237000 | 54711.3 | 7112.7 |
| Maluku | 2007 | 485308 | 552729 | 635000 | 15750.2 | 0.0 |
| Maluku | 2008 | 499555 | 559239 | 700000 | 16416.9 | 0.0 |
| Maluku | 2009 | 533015 | 596030 | 775000 | 17309.3 | 0.0 |
| Maluku | 2010 | 586430 | 651339 | 840000 | 18428.6 | 0.0 |
| Maluku | 2011 | 650112 | 701893 | 900000 | 19597.4 | 160.1 |
| Maluku | 2012 | 610362 | 659953 | 975000 | 21000.1 | 117.3 |
| Maluku | 2013 | 598792 | 663481 | 1275000 | 22100.9 | 728.8 |
| Maluku | 2014 | 601651 | 672304 | 1415000 | 23567.7 | 180.8 |
| Maluku | 2015 | 655063 | 727259 | 1650000 | 24859.1 | 1137.4 |
| Maluku | 2016 | 690786 | 743149 | 1775000 | 26291.2 | 1427.6 |
| Maluku Utara | 2007 | 372339 | 396322 | 660000 | 12345.8 | 0.0 |
| Maluku Utara | 2008 | 394557 | 421880 | 700000 | 13085.8 | 0.0 |
| Maluku Utara | 2009 | 393834 | 422398 | 770000 | 13880.2 | 0.0 |
| Maluku Utara | 2010 | 411361 | 437758 | 847000 | 14983.9 | 3395.7 |
| Maluku Utara | 2011 | 437870 | 463604 | 889350 | 16002.5 | 1805.2 |
| Maluku Utara | 2012 | 443946 | 466110 | 960498 | 17120.1 | 1567.0 |
| Maluku Utara | 2013 | 445359 | 463243 | 1200622 | 18208.7 | 4821.2 |
| Maluku Utara | 2014 | 456017 | 481504 | 1440746 | 19208.8 | 1518.7 |
| Maluku Utara | 2015 | 482543 | 513601 | 1577617 | 20381.0 | 2861.4 |
| Maluku Utara | 2016 | 503479 | 524526 | 1681266 | 21556.3 | 6067.3 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

A.3 Data Total Penyerapan Tenaga Kerja, Total Jumlah Angkatan Kerja, Total UMP, Total PDRB, dan Total Investasi di 6 Koridor Ekonomi

A.3.1 Data Total Penyerapan Tenaga Kerja di 6 Koridor Ekonomi

| Tahun | Koridor Sumatera | Koridor Jawa | Koridor Kalimantan | Koridor Sulawesi | Koridor Bali-Nusa Tenggara | Koridor Papua-Kep. Maluku |
|-------|------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| 2007 | 19,714,550 | 59,910,151 | 5,661,643 | 6,634,050 | 5,942,959 | 2,066,864 |
| 2008 | 20,780,151 | 60,579,396 | 5,952,691 | 6,981,568 | 6,020,616 | 2,238,328 |
| 2009 | 21,329,192 | 61,760,684 | 6,088,855 | 7,172,065 | 6,185,231 | 2,334,636 |
| 2010 | 22,904,565 | 62,497,993 | 6,343,895 | 7,319,001 | 6,371,520 | 2,770,883 |
| 2011 | 22,975,072 | 63,186,400 | 6,668,205 | 7,635,023 | 6,263,373 | 2,900,797 |
| 2012 | 22,628,671 | 65,246,649 | 6,617,169 | 7,455,033 | 6,343,155 | 2,923,982 |
| 2013 | 22,689,861 | 65,347,306 | 6,582,332 | 7,356,075 | 6,331,687 | 3,032,102 |
| 2014 | 23,661,690 | 66,532,537 | 6,925,927 | 7,914,271 | 6,540,690 | 3,053,541 |
| 2015 | 23,913,680 | 66,035,108 | 7,031,050 | 7,977,450 | 6,671,599 | 3,190,312 |
| 2016 | 25,258,225 | 66,188,843 | 7,355,762 | 8,655,477 | 7,060,933 | 3,261,110 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah.

A.3.2 Data Total Jumlah Angkatan Kerja di 6 Koridor Ekonomi

| Tahun | Koridor Sumatera | Koridor Jawa | Koridor Kalimantan | Koridor Sulawesi | Koridor Bali-Nusa Tenggara | Koridor Papua - Kep. Maluku |
|-------|------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2007 | 21,665,501 | 66,323,429 | 6,134,185 | 7,348,748 | 6,233,525 | 2,235,971 |
| 2008 | 22,586,766 | 66,711,201 | 6,384,177 | 7,570,418 | 6,295,278 | 2,398,715 |
| 2009 | 23,101,500 | 67,469,498 | 6,531,010 | 7,760,429 | 6,472,354 | 2,498,849 |
| 2010 | 24,574,478 | 67,741,578 | 6,752,809 | 7,862,914 | 6,630,606 | 2,941,561 |
| 2011 | 24,405,948 | 68,264,269 | 7,058,162 | 8,085,964 | 6,484,298 | 3,071,844 |
| 2012 | 23,988,869 | 69,585,170 | 6,987,319 | 7,855,874 | 6,562,784 | 3,073,094 |
| 2013 | 24,189,450 | 69,646,482 | 6,886,626 | 7,730,176 | 6,553,694 | 3,186,350 |
| 2014 | 25,152,495 | 71,128,168 | 7,265,758 | 8,313,179 | 6,786,006 | 3,227,345 |
| 2015 | 25,587,918 | 70,558,487 | 7,439,528 | 7,962,017 | 6,935,624 | 3,396,440 |
| 2016 | 26,707,794 | 71,207,579 | 7,785,013 | 9,035,720 | 7,281,018 | 3,424,664 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah.

A.3.3 Data Total Total UMP di 6 Koridor Ekonomi

| Tahun | Koridor Sumatera | Koridor Jawa | Koridor Kalimantan | Koridor Sulawesi | Koridor Bali - Nusa Tenggara | Koridor Papua – Kep. Maluku |
|-------|------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2007 | 7,040,838 | 3,612,400 | 2,737,473 | 3,929,664 | 1,867,000 | 3,269,000 |
| 2008 | 7,842,205 | 4,010,797 | 3,125,522 | 4,296,020 | 2,062,650 | 3,611,000 |
| 2009 | 8,679,330 | 4,460,556 | 3,463,089 | 4,908,900 | 2,317,500 | 3,941,100 |
| 2010 | 9,431,325 | 4,780,500 | 3,754,090 | 5,291,700 | 2,520,091 | 4,213,500 |
| 2011 | 10,305,940 | 5,210,000 | 4,147,080 | 5,676,000 | 2,690,000 | 4,602,350 |
| 2012 | 11,355,720 | 5,753,700 | 4,629,459 | 6,331,800 | 2,892,500 | 4,970,498 |

| | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 2013 | 13,585,087 | 6,863,300 | 5,702,700 | 7,450,207 | 3,291,000 | 5,905,622 |
| 2014 | 15,827,717 | 7,664,800 | 6,610,285 | 9,075,000 | 3,902,600 | 6,765,746 |
| 2015 | 17,837,346 | 8,198,500 | 9,378,619 | 10,557,500 | 4,201,172 | 7,435,617 |
| 2016 | 20,133,585 | 10,910,190 | 10,218,601 | 11,909,000 | 4,715,550 | 8,128,266 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah.

A.3.4 Data Total Total PDRB di 6 Koridor Ekonomi

| Tahun | Koridor Sumatera | Koridor Jawa | Koridor Kalimantan | Koridor Sulawesi | Koridor Bali-Nusa Tenggara | Koridor Papua-Kep. Maluku |
|-------|------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| 2007 | 1,339,393.1 | 2,586,643.6 | 564,127.1 | 384,099.7 | 174,646.5 | 149,295.3 |
| 2008 | 1,406,596.0 | 3,528,446.5 | 593,891.9 | 307,807.6 | 182,845.2 | 151,429.5 |
| 2009 | 1,457,890.6 | 3,698,265.4 | 613,376.1 | 329,067.1 | 196,178.3 | 177,846.5 |
| 2010 | 1,536,366.6 | 3,931,806.6 | 646,113.5 | 356,274.8 | 207,718.6 | 185,582.4 |
| 2011 | 1,631,726.0 | 3,891,900.1 | 687,807.0 | 386,696.5 | 213,704.8 | 184,533.8 |
| 2012 | 1,725,535.8 | 4,448,833.5 | 832,642.0 | 421,671.1 | 222,155.5 | 190,434.4 |
| 2013 | 1,810,953.3 | 4,689,319.6 | 871,605.0 | 454,094.6 | 235,375.5 | 205,122.6 |
| 2014 | 1,874,169.7 | 4,980,095.6 | 908,553.0 | 485,289.7 | 249,268.6 | 214,427.6 |
| 2015 | 1,961,071.7 | 5,251,451.2 | 931,937.9 | 525,030.1 | 275,307.1 | 228,046.5 |
| 2016 | 2,147,251.4 | 5,545,055.1 | 961,574.6 | 563,977.2 | 291,516.4 | 245,035.2 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah.

A.3.5 Data Total Total Investasi di 6 Koridor Ekonomi

| Tahun | Koridor Sumatera | Koridor Jawa | Koridor Kalimantan | Koridor Sulawesi | Koridor Bali-Nusa Tenggara | Koridor Papua-Kep. Maluku |
|-------|------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| 2007 | 30,901.1 | 141,170.1 | 5,888.4 | 5,028.7 | 832.3 | 34.5 |
| 2008 | 19,393.1 | 207,675.1 | 3,482.5 | 2,089.5 | 1,423.5 | 564.0 |
| 2009 | 19,017.1 | 160,758.0 | 7,031.4 | 3,227.2 | 3,423.2 | 81.3 |
| 2010 | 14,495.9 | 202,579.9 | 42,226.1 | 71,085.1 | 9,057.0 | 8,452.1 |
| 2011 | 44,878.9 | 181,484.9 | 39,845.4 | 17,009.8 | 13,507.9 | 21,960.4 |
| 2012 | 65,521.9 | 236,879.1 | 60,848.8 | 25,703.4 | 18,717.8 | 18,824.4 |
| 2013 | 69,566.5 | 318,940.8 | 66,841.3 | 24,303.7 | 16,671.9 | 39,763.8 |
| 2014 | 82,408.6 | 374,527.7 | 85,668.3 | 35,490.2 | 14,180.2 | 21,568.2 |
| 2015 | 89,065.3 | 393,268.0 | 100,329.2 | 35,207.2 | 20,357.2 | 21,289.2 |
| 2016 | 113,705.2 | 422,948.4 | 69,175.6 | 51,733.9 | 15,730.5 | 30,746.7 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah.

Lampiran B. Hasil Uji Chow

B.1 Hasil Uji Chow Koridor Sumatera

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
| Cross-section F | 13.137822 | (9,86) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 86.495040 | 9 | 0.0000 |

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PTK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/31/18 Time: 09:35

Sample: 2007 2016

Periods included: 10

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 100

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| C | -4733.603 | 14415.79 | -0.328362 | 0.7434 |
| AK | 0.932185 | 0.003484 | 267.5808 | 0.0000 |
| UMP | 0.014748 | 0.010672 | 1.381963 | 0.1702 |
| PDRB | -0.175899 | 0.059456 | -2.958483 | 0.0039 |
| I | 3.548564 | 0.937629 | 3.784614 | 0.0003 |
| R-squared | 0.999344 | Mean dependent var | | 2258557. |
| Adjusted R-squared | 0.999316 | S.D. dependent var | | 1557448. |
| S.E. of regression | 40736.72 | Akaike info criterion | | 24.11635 |
| Sum squared resid | 1.58E+11 | Schwarz criterion | | 24.24661 |
| Log likelihood | -1200.818 | Hannan-Quinn criter. | | 24.16907 |
| F-statistic | 36153.04 | Durbin-Watson stat | | 0.418405 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

B.2 Hasil Uji Chow Koridor Jawa

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
| Cross-section F | 40.886053 | (5,50) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 97.620227 | 5 | 0.0000 |

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PTK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/31/18 Time: 11:27

Sample: 2007 2016

Periods included: 10

Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 60

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| C | -210623.8 | 176372.9 | -1.194196 | 0.2375 |
| AK | 0.937855 | 0.012416 | 75.53311 | 0.0000 |
| UMP | 0.006137 | 0.154555 | 0.039707 | 0.9685 |
| PDRB | 0.063705 | 0.256076 | 0.248775 | 0.8045 |
| I | 0.141522 | 1.772108 | 0.079861 | 0.9366 |
| R-squared | 0.997212 | Mean dependent var | | 10611468 |
| Adjusted R-squared | 0.997009 | S.D. dependent var | | 7246013. |
| S.E. of regression | 396287.2 | Akaike info criterion | | 28.69732 |
| Sum squared resid | 8.64E+12 | Schwarz criterion | | 28.87185 |
| Log likelihood | -855.9196 | Hannan-Quinn criter. | | 28.76559 |
| F-statistic | 4917.649 | Durbin-Watson stat | | 0.152589 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

B.3 Hasil Uji Chow Koridor Kalimantan

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
| Cross-section F | 11.716536 | (4,41) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 38.112124 | 4 | 0.0000 |

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PTK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/31/18 Time: 11:44

Sample: 2007 2016

Periods included: 10

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 50

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| C | -2395.424 | 6014.155 | -0.398298 | 0.6923 |
| AK | 0.956701 | 0.004006 | 238.8160 | 0.0000 |
| UMP | 0.009945 | 0.005496 | 1.809470 | 0.0771 |
| PDRB | -0.252600 | 0.024064 | -10.49714 | 0.0000 |
| I | 1.055434 | 0.376718 | 2.801653 | 0.0075 |
| R-squared | 0.999415 | Mean dependent var | | 1304551. |
| Adjusted R-squared | 0.999363 | S.D. dependent var | | 732521.0 |
| S.E. of regression | 18493.17 | Akaike info criterion | | 22.58283 |
| Sum squared resid | 1.54E+10 | Schwarz criterion | | 22.77403 |
| Log likelihood | -559.5708 | Hannan-Quinn criter. | | 22.65564 |
| F-statistic | 19208.76 | Durbin-Watson stat | | 0.687419 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

B.4 Hasil Uji Chow Koridor Sulawesi

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
| Cross-section F | 7.833725 | (5,50) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 34.710373 | 5 | 0.0000 |

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PTK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/31/18 Time: 11:58

Sample: 2007 2016

Periods included: 10

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 60

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| C | 6992.444 | 32288.02 | 0.216565 | 0.8293 |
| AK | 0.854416 | 0.039697 | 21.52359 | 0.0000 |
| UMP | 0.034987 | 0.023551 | 1.485581 | 0.1431 |
| PDRB | 0.964454 | 0.638639 | 1.510170 | 0.1367 |
| I | 0.619760 | 1.060896 | 0.584185 | 0.5615 |
| R-squared | 0.995681 | Mean dependent var | | 1250474. |
| Adjusted R-squared | 0.995367 | S.D. dependent var | | 982081.4 |
| S.E. of regression | 66845.60 | Akaike info criterion | | 25.13781 |
| Sum squared resid | 2.46E+11 | Schwarz criterion | | 25.31234 |
| Log likelihood | -749.1344 | Hannan-Quinn criter. | | 25.20608 |
| F-statistic | 3170.017 | Durbin-Watson stat | | 1.807757 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

B.5 Hasil Uji Chow Koridor Bali Nusa – Tenggara

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
| Cross-section F | 79.531600 | (2,23) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 62.065790 | 2 | 0.0000 |

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PTK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/31/18 Time: 12:10

Sample: 2007 2016

Periods included: 10

Cross-sections included: 3

Total panel (balanced) observations: 30

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| C | -350286.6 | 125469.4 | -2.791810 | 0.0099 |
| AK | 1.114590 | 0.066180 | 16.84190 | 0.0000 |
| UMP | -0.023576 | 0.025764 | -0.915061 | 0.3689 |
| PDRB | 0.705436 | 0.264497 | 2.667083 | 0.0132 |
| I | -3.976403 | 1.839249 | -2.161970 | 0.0404 |
| R-squared | 0.970926 | Mean dependent var | | 2124392. |
| Adjusted R-squared | 0.966274 | S.D. dependent var | | 134295.7 |
| S.E. of regression | 24662.90 | Akaike info criterion | | 23.21500 |
| Sum squared resid | 1.52E+10 | Schwarz criterion | | 23.44853 |
| Log likelihood | -343.2250 | Hannan-Quinn criter. | | 23.28971 |
| F-statistic | 208.7182 | Durbin-Watson stat | | 0.478455 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

B.6 Hasil Uji Chow Koridor Papua – Kepulauan Maluku

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
| Cross-section F | 32.608563 | (3,32) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 56.018271 | 3 | 0.0000 |

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PTK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/31/18 Time: 12:28

Sample: 2007 2016

Periods included: 10

Cross-sections included: 4

Total panel (balanced) observations: 40

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| C | -14369.49 | 7250.129 | -1.981964 | 0.0554 |
| AK | 0.937476 | 0.009725 | 96.40285 | 0.0000 |
| UMP | -0.003284 | 0.005266 | -0.623558 | 0.5370 |
| PDRB | 0.396823 | 0.112275 | 3.534366 | 0.0012 |
| I | 0.864357 | 0.377353 | 2.290579 | 0.0281 |
| R-squared | 0.999388 | Mean dependent var | | 694313.9 |
| Adjusted R-squared | 0.999319 | S.D. dependent var | | 451174.7 |
| S.E. of regression | 11777.35 | Akaike info criterion | | 21.70221 |
| Sum squared resid | 4.85E+09 | Schwarz criterion | | 21.91332 |
| Log likelihood | -429.0443 | Hannan-Quinn criter. | | 21.77854 |
| F-statistic | 14299.91 | Durbin-Watson stat | | 0.595219 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

Lampiran C. Hasil Uji Hausman

C.1 Hasil Uji Hausman Koridor Sumatera

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|----------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 54.703808 | 4 | 0.0000 |

Cross-section random effects test comparisons:

| Variable | Fixed | Random | Var(Diff.) | Prob. |
|----------|-----------|-----------|------------|--------|
| AK | 0.981735 | 0.929328 | 0.000692 | 0.0463 |
| UMP | -0.017523 | 0.022524 | 0.000063 | 0.0000 |
| PDRB | 0.591339 | -0.089809 | 0.019824 | 0.0000 |
| I | 1.916452 | 3.148756 | 0.076663 | 0.0000 |

C.2 Hasil Uji Hausman Koridor Jawa

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|----------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 2.666345 | 4 | 0.6151 |

Cross-section random effects test comparisons:

| Variable | Fixed | Random | Var(Diff.) | Prob. |
|----------|----------|----------|------------|--------|
| AK | 1.006325 | 0.947238 | 0.002578 | 0.2445 |
| UMP | 0.014954 | 0.047223 | 0.000655 | 0.2075 |
| PDRB | 0.315140 | 0.298947 | 0.001341 | 0.6583 |
| I | 1.635168 | 1.833418 | 0.038137 | 0.3100 |

C.3 Hasil Uji Hausman Koridor Kalimantan

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|----------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 46.866142 | 4 | 0.0000 |

Cross-section random effects test comparisons:

| Variable | Fixed | Random | Var(Diff.) | Prob. |
|----------|----------|-----------|------------|--------|
| AK | 0.876296 | 0.956701 | 0.000810 | 0.0047 |
| UMP | 0.006062 | 0.009945 | 0.000015 | 0.3209 |
| PDRB | 0.145380 | -0.252600 | 0.003541 | 0.0000 |
| I | 1.283097 | 1.055434 | 0.024161 | 0.1430 |

C.4 Hasil Uji Hausman Koridor Sulawesi

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 21.755993 | 4 | 0.0002 |

Cross-section random effects test comparisons:

| Variable | Fixed | Random | Var(Diff.) | Prob. |
|----------|----------|----------|------------|--------|
| AK | 0.493548 | 0.841148 | 0.005852 | 0.0000 |
| UMP | 0.111832 | 0.048927 | 0.000186 | 0.0000 |
| PDRB | 0.383419 | 0.909332 | 0.013790 | 0.0000 |
| I | 0.548204 | 0.240926 | 0.014771 | 0.0115 |

C.5 Hasil Uji Hausman Koridor Bali – Nusa Tenggara

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 18.326913 | 4 | 0.0004 |

Cross-section random effects test comparisons:

| Variable | Fixed | Random | Var(Diff.) | Prob. |
|----------|-----------|-----------|------------|--------|
| X1 | -0.044834 | 0.007308 | 0.000201 | 0.0002 |
| X2 | 0.050137 | -0.036300 | 0.000551 | 0.0002 |
| X3 | 0.000653 | 0.000589 | 0.000002 | 0.9616 |

C.6 Hasil Uji Hausman Koridor Papua – Kepulauan Maluku

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 30.165261 | 4 | 0.0000 |

Cross-section random effects test comparisons:

| Variable | Fixed | Random | Var(Diff.) | Prob. |
|----------|-----------|-----------|------------|--------|
| AK | 0.002723 | 0.000286 | 0.000001 | 0.0055 |
| UMP | -1.510218 | -1.538166 | 0.000172 | 0.0333 |
| PDRB | 0.010220 | -0.006966 | 0.000019 | 0.0001 |
| I | -6.502349 | 0.175239 | 17.567226 | 0.1111 |

Lampiran D. Uji Panel Least Square

D.1 Hasil Uji Panel Koridor Sumatera

Dependent Variable: PTK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/31/18 Time: 09:37

Sample: 2007 2016

Periods included: 10

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 100

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -205875.2 | 53920.96 | -3.818092 | 0.0003 |
| AK | 0.981735 | 0.026644 | 36.84606 | 0.0000 |
| UMP | -0.017523 | 0.011103 | -1.578154 | 0.1182 |
| PDRB | 0.591339 | 0.154264 | 3.833284 | 0.0002 |
| I | 1.916452 | 0.751199 | 2.551190 | 0.0125 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.999724 | Mean dependent var | 2258557. |
| Adjusted R-squared | 0.999682 | S.D. dependent var | 1557448. |
| S.E. of regression | 27782.86 | Akaike info criterion | 23.43140 |
| Sum squared resid | 6.64E+10 | Schwarz criterion | 23.79613 |
| Log likelihood | -1157.570 | Hannan-Quinn criter. | 23.57901 |
| F-statistic | 23924.60 | Durbin-Watson stat | 0.819701 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

D.2 Hasil Uji Panel Koridor Jawa

Dependent Variable: PTK
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/31/18 Time: 11:29
 Sample: 2007 2016
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 60
 Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| C | -603791.8 | 401123.8 | -1.505251 | 0.1380 |
| AK | 0.947238 | 0.029530 | 32.07691 | 0.0000 |
| UMP | 0.047223 | 0.085052 | 0.555229 | 0.5810 |
| PDRB | 0.298947 | 0.206488 | 1.447773 | 0.1534 |
| I | 1.833418 | 0.933188 | 1.964681 | 0.0545 |
| Effects Specification | | | | |
| | | | S.D. | Rho |
| Cross-section random | | | 606208.5 | 0.9154 |
| Idiosyncratic random | | | 184249.8 | 0.0846 |
| Weighted Statistics | | | | |
| R-squared | 0.961671 | Mean dependent var | 1015228. | |
| Adjusted R-squared | 0.958883 | S.D. dependent var | 897568.0 | |
| S.E. of regression | 182002.2 | Sum squared resid | 1.82E+12 | |
| F-statistic | 344.9847 | Durbin-Watson stat | 0.808525 | |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |
| Unweighted Statistics | | | | |
| R-squared | 0.996340 | Mean dependent var | 10611468 | |
| Sum squared resid | 1.13E+13 | Durbin-Watson stat | 0.129930 | |

D.3 Hasil Uji Panel Koridor Kalimantan

Dependent Variable: PTK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/31/18 Time: 11:45
 Sample: 2007 2016
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 50

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 50323.75 | 33513.74 | 1.501586 | 0.1409 |
| AK | 0.876296 | 0.028596 | 30.64370 | 0.0000 |
| UMP | 0.006062 | 0.005547 | 1.092776 | 0.2809 |
| PDRB | 0.145380 | 0.061952 | 2.346668 | 0.0239 |
| I | 1.283097 | 0.311196 | 4.123120 | 0.0002 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.999727 | Mean dependent var | 1304551. |
| Adjusted R-squared | 0.999674 | S.D. dependent var | 732521.0 |
| S.E. of regression | 13234.48 | Akaike info criterion | 21.98059 |
| Sum squared resid | 7.18E+09 | Schwarz criterion | 22.32475 |
| Log likelihood | -540.5147 | Hannan-Quinn criter. | 22.11165 |
| F-statistic | 18759.18 | Durbin-Watson stat | 1.372349 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

D.4 Hasil Uji Panel Koridor Sulawesi

Dependent Variable: PTK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/31/18 Time: 11:59
 Sample: 2007 2016
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 60

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 437509.5 | 99126.84 | 4.413634 | 0.0001 |
| AK | 0.493548 | 0.084319 | 5.853325 | 0.0000 |
| UMP | 0.111832 | 0.023782 | 4.702484 | 0.0000 |
| PDRB | 0.383419 | 0.520685 | 0.736375 | 0.4649 |
| I | 0.548204 | 0.875465 | 0.626185 | 0.5340 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.997578 | Mean dependent var | 1250474. |
| Adjusted R-squared | 0.997142 | S.D. dependent var | 982081.4 |
| S.E. of regression | 52498.65 | Akaike info criterion | 24.72597 |
| Sum squared resid | 1.38E+11 | Schwarz criterion | 25.07503 |
| Log likelihood | -731.7792 | Hannan-Quinn criter. | 24.86251 |
| F-statistic | 2288.522 | Durbin-Watson stat | 1.527975 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

D.5 Hasil Uji Panel Koridor Bali – Nusa Tenggara

Dependent Variable: PTK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/31/18 Time: 12:13
 Sample: 2007 2016
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 3
 Total panel (balanced) observations: 30

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -45571.65 | 53053.48 | -0.858976 | 0.3992 |
| AK | 0.949665 | 0.030885 | 30.74819 | 0.0000 |

| | | | | |
|------|-----------|----------|-----------|--------|
| UMP | -0.024715 | 0.018488 | -1.336784 | 0.1944 |
| PDRB | 1.248834 | 0.518248 | 2.409724 | 0.0244 |
| I | 1.248723 | 0.808862 | 1.543803 | 0.1363 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.996327 | Mean dependent var | 2124392. |
| Adjusted R-squared | 0.995369 | S.D. dependent var | 134295.7 |
| S.E. of regression | 9139.090 | Akaike info criterion | 21.27947 |
| Sum squared resid | 1.92E+09 | Schwarz criterion | 21.60642 |
| Log likelihood | -312.1921 | Hannan-Quinn criter. | 21.38407 |
| F-statistic | 1039.841 | Durbin-Watson stat | 2.009018 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

D.6 Hasil Uji Panel Koridor Papua – Kepulauan Maluku

Dependent Variable: PTK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/31/18 Time: 12:32

Sample: 2007 2016

Periods included: 10

Cross-sections included: 4

Total panel (balanced) observations: 40

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -30101.95 | 6872.134 | -4.380291 | 0.0001 |
| AK | 0.978265 | 0.011830 | 82.69140 | 0.0000 |
| UMP | -0.001705 | 0.004557 | -0.374090 | 0.7108 |
| PDRB | 0.121720 | 0.217749 | 0.558993 | 0.5801 |
| I | 0.103788 | 0.225777 | 0.459692 | 0.6488 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.999849 | Mean dependent var | 694313.9 |
| Adjusted R-squared | 0.999816 | S.D. dependent var | 451174.7 |
| S.E. of regression | 6115.068 | Akaike info criterion | 20.45176 |
| Sum squared resid | 1.20E+09 | Schwarz criterion | 20.78953 |
| Log likelihood | -401.0351 | Hannan-Quinn criter. | 20.57388 |
| F-statistic | 30324.10 | Durbin-Watson stat | 1.679058 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Lampiran E. Hasil Uji Asumsi Klasik

E.1 Uji Asumsi Klasik Koridor Sumatera

E.1.1 Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas Koridor Sumatera

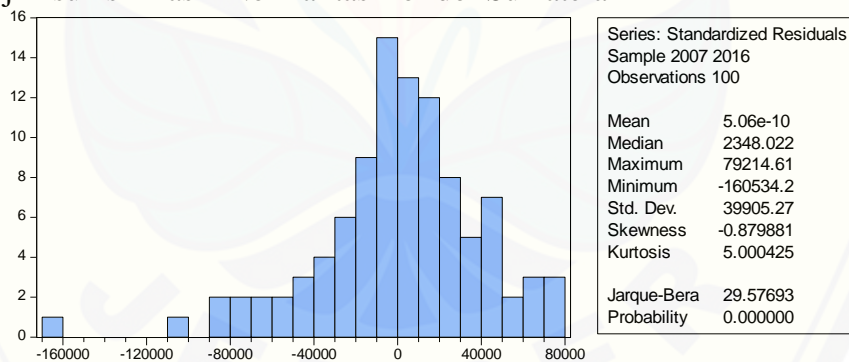
| | AK | UMP | PDRB | I |
|------|----------|----------|----------|----------|
| AK | 1.000000 | 0.073860 | 0.702604 | 0.438764 |
| UMP | 0.073860 | 1.000000 | 0.241555 | 0.492744 |
| PDRB | 0.702604 | 0.241555 | 1.000000 | 0.724927 |
| I | 0.438764 | 0.492744 | 0.724927 | 1.000000 |

E.1.2 Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas Koridor Sumatera

Dependent Variable: REABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/31/18 Time: 09:40
 Sample: 2007 2016
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 100

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 4175.024 | 8690.113 | 0.480434 | 0.6320 |
| AK | 0.008820 | 0.002100 | 1.199687 | 0.1211 |
| UMP | 0.006699 | 0.006433 | 1.041286 | 0.3004 |
| PDRB | -0.004072 | 0.035841 | -0.113603 | 0.9098 |
| I | -0.746033 | 0.565221 | -1.319897 | 0.1900 |

E.1.3 Uji Asumsi Klasik Normalitas Koridor Sumatera



E.1.4 Uji Asumsi Klasik Autokorelasi Koridor Sumatera

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| R-squared | 0.999724 | Mean dependent var | 2258557. |
| Adjusted R-squared | 0.999682 | S.D. dependent var | 1557448. |
| S.E. of regression | 27782.86 | Akaike info criterion | 23.43140 |
| Sum squared resid | 6.64E+10 | Schwarz criterion | 23.79613 |
| Log likelihood | -1157.570 | Hannan-Quinn criter. | 23.57901 |
| F-statistic | 23924.60 | Durbin-Watson stat | 0.819701 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

E.2 Uji Asumsi Klasik Koridor Jawa

E.2.1 Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas Koridor Jawa

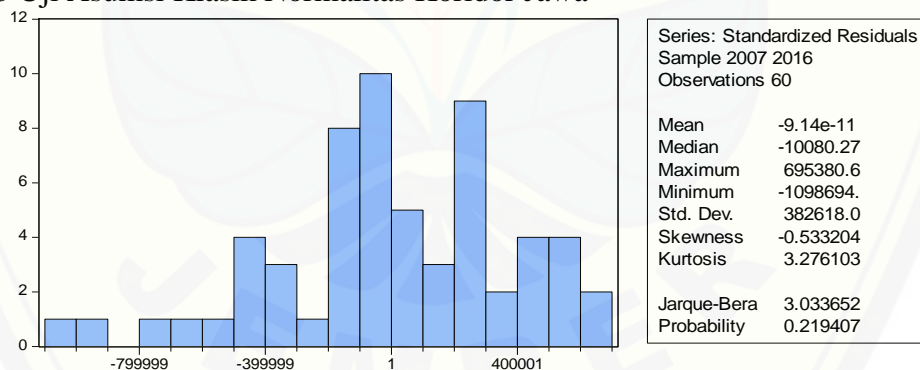
| | AK | UMP | PDRB | I |
|------|-----------|-----------|----------|----------|
| AK | 1.000000 | -0.307184 | 0.585536 | 0.328849 |
| UMP | -0.307184 | 1.000000 | 0.410520 | 0.317423 |
| PDRB | 0.585536 | 0.410520 | 1.000000 | 0.688839 |
| I | 0.328849 | 0.317423 | 0.688839 | 1.000000 |

E.2.2 Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas Koridor Jawa

Dependent Variable: REABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/31/18 Time: 11:32
 Sample: 2007 2016
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 60

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 194435.0 | 90123.94 | 2.157418 | 0.0354 |
| AK | 0.015794 | 0.006345 | 1.489373 | 0.1159 |
| UMP | -0.085647 | 0.078975 | -1.084473 | 0.2829 |
| PDRB | -0.048662 | 0.130851 | -0.371891 | 0.7114 |
| I | 0.897923 | 0.905521 | 0.991610 | 0.3257 |

E.2.3 Uji Asumsi Klasik Normalitas Koridor Jawa



E.2.4 Uji Asumsi Klasik Autokorelasi Koridor Jawa

| Weighted Statistics | | | |
|---------------------|----------|---------------------------|-----------------|
| R-squared | 0.961671 | Mean dependent var | 1015228. |
| Adjusted R-squared | 0.958883 | S.D. dependent var | 897568.0 |
| S.E. of regression | 182002.2 | Sum squared resid | 1.82E+12 |
| F-statistic | 344.9847 | Durbin-Watson stat | 0.808525 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

E.3 Uji Asumsi Klasik Koridor Kalimantan

E.3.1 Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas Koridor Kalimantan

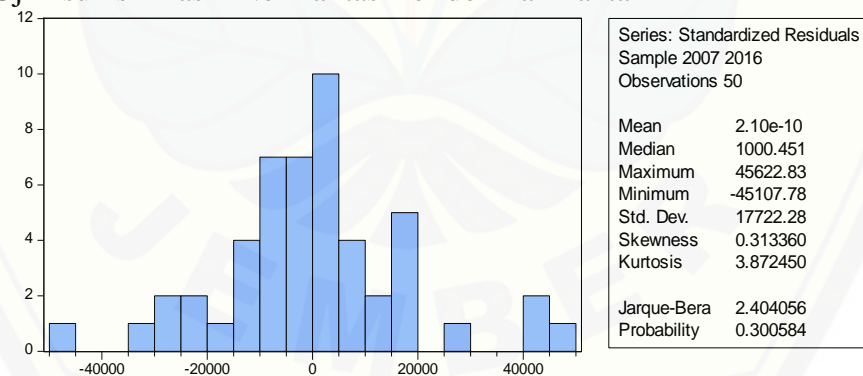
| | AK | UMP | PDRB | I |
|------|----------|----------|----------|----------|
| AK | 1.000000 | 0.474957 | 0.404684 | 0.389340 |
| UMP | 0.474957 | 1.000000 | 0.445425 | 0.636010 |
| PDRB | 0.404684 | 0.445425 | 1.000000 | 0.666988 |
| I | 0.389340 | 0.636010 | 0.666988 | 1.000000 |

E.3.2 Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas Koridor Kalimantan

Dependent Variable: REABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/31/18 Time: 11:48
 Sample: 2007 2016
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 50

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 4029.615 | 3623.733 | 1.112007 | 0.2720 |
| AK | 0.007560 | 0.002414 | 1.132195 | 0.1030 |
| UMP | 0.001969 | 0.003312 | 0.594578 | 0.5551 |
| PDRB | -0.009560 | 0.014499 | -0.659317 | 0.5131 |
| I | -0.242846 | 0.226986 | -1.069874 | 0.2904 |

E.3.3 Uji Asumsi Klasik Normalitas Koridor Kalimantan



E.3.4 Uji Asumsi Klasik Autokorelasi Koridor Kalimantan

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| R-squared | 0.999727 | Mean dependent var | 1304551. |
| Adjusted R-squared | 0.999674 | S.D. dependent var | 732521.0 |
| S.E. of regression | 13234.48 | Akaike info criterion | 21.98059 |
| Sum squared resid | 7.18E+09 | Schwarz criterion | 22.32475 |
| Log likelihood | -540.5147 | Hannan-Quinn criter. | 22.11165 |
| F-statistic | 18759.18 | Durbin-Watson stat | 1.372349 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

E.4 Uji Asumsi Klasik Koridor Sulawesi

E.4.1 Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas Koridor Sulawesi

| | AK | UMP | PDRB | I |
|------|----------|----------|----------|----------|
| AK | 1.000000 | 0.204232 | 0.767955 | 0.443909 |
| UMP | 0.204232 | 1.000000 | 0.337214 | 0.187539 |
| PDRB | 0.767955 | 0.337214 | 1.000000 | 0.406755 |
| I | 0.443909 | 0.187539 | 0.406755 | 1.000000 |

E.4.2 Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas Koridor Sulawesi

Dependent Variable: REABS

Method: Panel Least Squares

Date: 07/31/18 Time: 12:03

Sample: 2007 2016

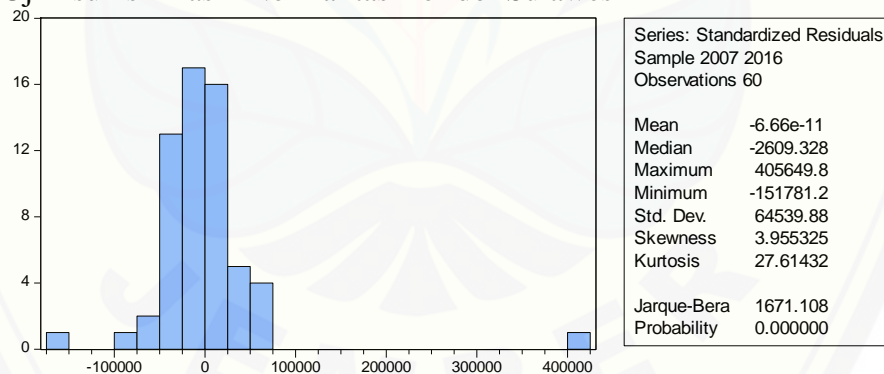
Periods included: 10

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 60

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 33471.27 | 26041.92 | 1.285284 | 0.2041 |
| AK | -0.060735 | 0.032017 | -1.896939 | 0.0631 |
| UMP | 0.005996 | 0.018995 | 0.315644 | 0.7535 |
| PDRB | 1.048746 | 0.515095 | 2.036025 | 0.0566 |
| I | -0.294502 | 0.855666 | -0.344178 | 0.7320 |

E.4.3 Uji Asumsi Klasik Normalitas Koridor Sulawesi



E.4.4 Uji Asumsi Klasik Autokorelasi Koridor Sulawesi

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| R-squared | 0.997578 | Mean dependent var | 1250474. |
| Adjusted R-squared | 0.997142 | S.D. dependent var | 982081.4 |
| S.E. of regression | 52498.65 | Akaike info criterion | 24.72597 |
| Sum squared resid | 1.38E+11 | Schwarz criterion | 25.07503 |
| Log likelihood | -731.7792 | Hannan-Quinn criter. | 24.86251 |
| F-statistic | 2288.522 | Durbin-Watson stat | 1.527975 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

E.5 Uji Asumsi Klasik Koridor Bali – Nusa Tenggara

E.5.1 Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas Koridor Bali – Nusa Tenggara

| | AK | UMP | PDRB | I |
|------|----------|----------|----------|----------|
| AK | 1.000000 | 0.800589 | 0.600859 | 0.463675 |
| UMP | 0.800589 | 1.000000 | 0.628988 | 0.576691 |
| PDRB | 0.600859 | 0.628988 | 1.000000 | 0.711948 |
| I | 0.463675 | 0.576691 | 0.711948 | 1.000000 |

E.5.2 Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas Koridor Bali – Nusa Tenggara

Dependent Variable: REABS

Method: Panel Least Squares

Date: 07/31/18 Time: 12:19

Sample: 2007 2016

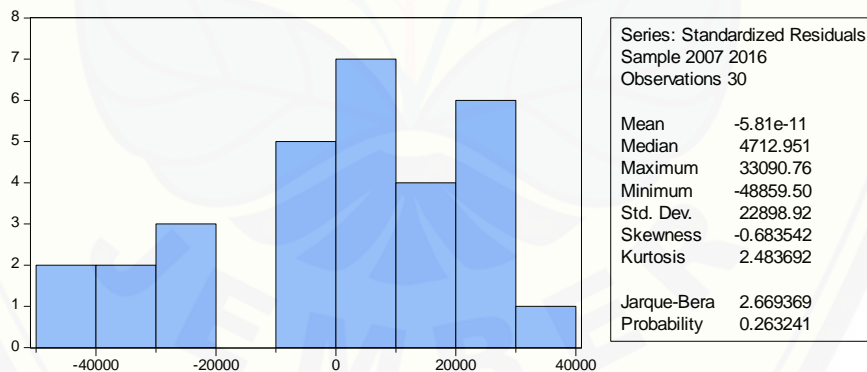
Periods included: 10

Cross-sections included: 3

Total panel (balanced) observations: 30

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -15021.33 | 25504.28 | -0.588973 | 0.5612 |
| AK | 0.011211 | 0.013452 | 0.833415 | 0.4125 |
| UMP | 0.003102 | 0.005237 | 0.592358 | 0.5589 |
| PDRB | -0.126890 | 0.053765 | -1.360099 | 0.1264 |
| I | 0.697616 | 0.373866 | 1.865951 | 0.0738 |

E.5.3 Uji Asumsi Klasik Normalitas Koridor Bali – Nusa Tenggara



E.5.4 Uji Asumsi Klasik Autokorelasi Koridor Bali – Nusa Tenggara

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| R-squared | 0.996327 | Mean dependent var | 2124392. |
| Adjusted R-squared | 0.995369 | S.D. dependent var | 134295.7 |
| S.E. of regression | 9139.090 | Akaike info criterion | 21.27947 |
| Sum squared resid | 1.92E+09 | Schwarz criterion | 21.60642 |
| Log likelihood | -312.1921 | Hannan-Quinn criter. | 21.38407 |
| F-statistic | 1039.841 | Durbin-Watson stat | 2.009018 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

E.6 Uji Asumsi Klasik Koridor Papua – Kepulauan Maluku

E.6.1 Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas Koridor Papua – Kepulauan Maluku

| | AK | UMP | PDRB | I |
|------|----------|----------|----------|----------|
| AK | 1.000000 | 0.436117 | 0.785710 | 0.670497 |
| UMP | 0.436117 | 1.000000 | 0.573905 | 0.528351 |
| PDRB | 0.785710 | 0.573905 | 1.000000 | 0.626688 |
| I | 0.670497 | 0.528351 | 0.626688 | 1.000000 |

E.6.2 Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas Koridor Papua – Kepulauan Maluku

Dependent Variable: REABS

Method: Panel Least Squares

Date: 07/31/18 Time: 12:35

Sample: 2007 2016

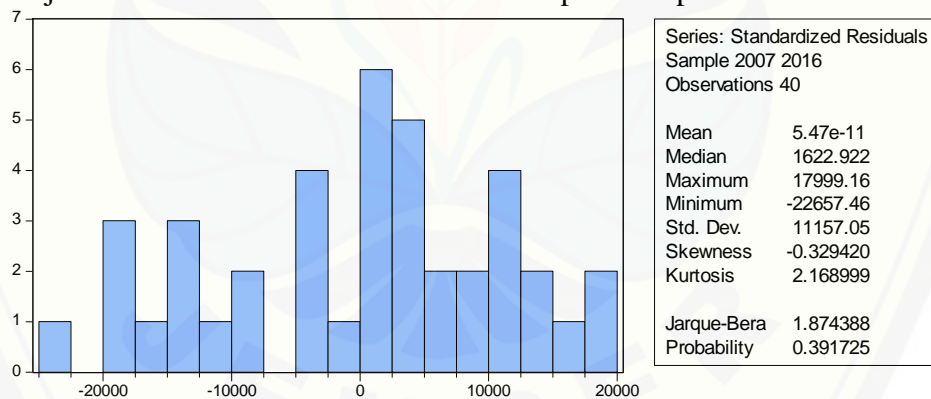
Periods included: 10

Cross-sections included: 4

Total panel (balanced) observations: 40

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -769.2244 | 1890.044 | -0.406988 | 0.6865 |
| AK | 0.004465 | 0.002535 | 1.761394 | 0.0869 |
| UMP | 0.004469 | 0.001373 | 1.255145 | 0.1025 |
| PDRB | -0.071580 | 0.029269 | -1.445587 | 0.1196 |
| I | -0.157965 | 0.098373 | -1.605788 | 0.1173 |

E.6.3 Uji Asumsi Klasik Normalitas Koridor Papua – Kepulauan Maluku



E.6.4 Uji Asumsi Klasik Autokorelasi Koridor Papua – Kepulauan Maluku

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| R-squared | 0.999849 | Mean dependent var | 694313.9 |
| Adjusted R-squared | 0.999816 | S.D. dependent var | 451174.7 |
| S.E. of regression | 6115.068 | Akaike info criterion | 20.45176 |
| Sum squared resid | 1.20E+09 | Schwarz criterion | 20.78953 |
| Log likelihood | -401.0351 | Hannan-Quinn criter. | 20.57388 |
| F-statistic | 30324.10 | Durbin-Watson stat | 1.679058 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Lampiran F. Data Terkait Pembahasan

F.1 Penduduk Koridor Bali – Nusa Tenggara Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2015-2016

| Status Pekerjaan | Bali | | Nusa Tenggara Barat | | Nusa Tenggara Timur | |
|---|------------------|------------------|--|------------------|---------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 1. | 315.131 | 382.946 | 368.178 | 425.401 | 338.587 | 382.679 |
| 2. | 363.442 | 435.670 | 454.938 | 529.563 | 652.162 | 670.414 |
| 3. | 98.779 | 88.872 | 58.993 | 78.638 | 35.669 | 38.272 |
| 4. | 998.602 | 1.014.982 | 511.268 | 557.859 | 439.359 | 535.603 |
| 5. | 71.142 | 66.128 | 214.574 | 365.051 | 28.513 | 27.002 |
| 6. | 157.937 | 129.932 | 209.100 | | 39.279 | 52.416 |
| 7. | 319.772 | 298.025 | 310.552 | 410.798 | 685.722 | 570.682 |
| Total Penduduk Bekerja | 2.324.805 | 2.416.555 | 2.127.503 | 2.367.310 | 2.219.291 | 2.277.068 |
| Pekerja Formal | 1.097.381 | 1.103.854 | 570.261 | 636.497 | 475.028 | 573.875 |
| Pekerja Informal | 1.227.424 | 1.312.701 | 1.557.242 | 1.730.813 | 1.744.263 | 1.703.193 |
| Total Pekerja Formal dan Informal Koridor Bali-Nusa Tenggara | | | a. Formal : 4.456.896 b. Informal : 9.275.636 | | | |

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah.

F.2 Penduduk Koridor Papua – Kepulauan Maluku Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2015-2016

| Status Pekerjaan | Papua | | Papua Barat | | Maluku | | Maluku Utara | |
|---|------------------|------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 1. | 221.024 | 235.965 | 71.658 | 90.146 | 158.619 | 174.016 | 96.693 | 107.339 |
| 2. | 496.590 | 517.657 | 71.441 | 65.487 | 120.386 | 132.527 | 98.196 | 97.415 |
| 3. | 15.884 | 23.444 | 9.640 | 8.830 | 12.433 | 11.252 | 16.294 | 19.928 |
| 4. | 293.745 | 336.630 | 140.350 | 154.414 | 197.035 | 235.739 | 135.223 | 161.185 |
| 5. | 11.914 | 2.795 | 3.091 | 796 | 7.406 | 24.923 | 14.140 | 16.138 |
| 6. | 12.175 | 15.547 | 9.906 | 18.978 | 17.372 | | 15.938 | 12.617 |
| 7. | 621.148 | 532.447 | 74.140 | 63.709 | 141.812 | 112.329 | 106.059 | 88.857 |
| Total Penduduk Bekerja | 1.672.480 | 1.664.485 | 380.226 | 402.360 | 655.063 | 690.786 | 482.543 | 503.479 |
| Pekerja Formal | 309.629 | 360.074 | 149.990 | 163.244 | 209.468 | 246.991 | 151.472 | 181.113 |
| Pekerja Informal | 1.362.851 | 1.304.411 | 230.236 | 239.116 | 445.595 | 443.795 | 331.071 | 322.366 |
| Total Pekerja Formal dan Informal Koridor Papua-Kepulauan Maluku | | | | a. Formal : 1.771.981 b. Informal : 4.679.441 | | | | |

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah.

Keterangan :

1. Berusaha Sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/Buruh dibayar
4. Buruh/Karyawan
5. Pekerja bebas di pertanian
6. Pekerja bebas nonpertanian
7. Pekerja tidak dibayar